

M.H. LUKMAN

TENTANG  
FRONT  
PERSATUAN  
NASIONAL



FRONT  
TENTANG  
PERSEKUTUAN  
NASIONAL

KAUM BURUH SEMUA NEGERI, BERSATULAH !

**M. H. LUKMAN**

**Tentang  
Front Persatuan Nasional**

*Tjetakan kedua*



Jajasan „Pembaruan“  
Djakarta 1962



## P E N G A N T A R

*Seperti dinjatakan pada penutupnja, isi brosur ini adalah suatu uraian jang diharapkan bisa membantu untuk lebih memahami apa jang dimaksudkan dengan front persatuan nasional oleh kaum Komunis. Front persatuan nasional bagi kaum Komunis adalah djalan untuk menjapai baik Pemerintah Gotongrojong maupun Pemerintah Demokrasi Rakjat. Oleh karena itu, isi brosur ini pada pokoknja merupakan pendjelasan mengenai rumusan front persatuan nasional didalam Program PKI jang berbunyi: „Hanja suatu front persatuan nasional jang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, dipimpin oleh klas buruh, dan terbentuk sebagai hasil gerakan Rakjat jang se-luas<sup>2</sup>nja dan perdjjuangan revolusioner daripada massa, akan memungkinkan Rakjat menudju kemenangannja”.*

*Sudah beberapa waktu lamanja isi brosur ini mendjadi bahan peladjaran tentang front persatuan nasional di Sekolah<sup>2</sup> Partai dipusat dan di-daerah<sup>2</sup> tingkat I. Ia disusun oleh Kawan M.H. Lukman, Wakil Ketua I CC PKI, sebagai diktat untuk mata peladjaran front persatuan nasional. Oleh karena itu, sebagai diktat ia telah lama diketahui dan dipeladjadi oleh sebagian dari kader<sup>2</sup> Partai.*

*Tetapi sekarang dengan diterbitkannja diktat ini mendjadi brosur, terbukalah kesempatan untuk membatja dan mempeladjarinja bukan sadja bagi kader<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> Partai tetapi djuga bagi umum. Semakin luas isi brosur ini dipeladjadi dan difahami oleh kader<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> Partai dan orang<sup>2</sup> diluar Partai, semakin baik. Sebab hal ini berarti lebih memberikan sjarat<sup>2</sup> untuk diwujudkannja front persatuan nasional itu didalam praktek.*

*Bagi kader<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup> Partai, semakin mercka mengerti tentang pentingnja arti front persatuan nasional dan tentang sjarat<sup>2</sup> daripada front persatuan nasional, semakin bisa diharapkan bahwa mereka akan mendjadi lebih tekun dan lebih teguh lagi didalam perdjjuangan untuk mewujudkan front persatuan nasional itu didalam praktek.*

Sebaliknya, bagi orang<sup>2</sup> diluar Partai jang berkemauan baik, semakin mereka mengerti apa jang sesungguhnya dimaksudkan dengan front persatuan nasional oleh kaum Komunis, tentunya semakin dapat diharapkan bahwa kalaupun tidak turut aktif didalam perdjuaan mewujudkan front persatuan nasional, se-kurang<sup>2</sup>nja mereka tidak lagi turut<sup>2</sup> dengan kaum reaksioner memfitnah politik front persatuan nasional dari Partai Komunis. Pendeknja, dengan lebih memahami isi brosur ini diharapkan bahwa orang<sup>2</sup> diluar Partai jang banjak sedikitnja sudah ambil bagian dalam penggalangan front persatuan nasional akan menjadi lebih aktif lagi didalam memberikan sumbangannja bagi terwujudnja front persatuan nasional; sedangkan bagi mereka jang tadinja mempunyai purbasangka djelek terhadap politik front persatuan nasional dari kaum Komunis diharapkan bisa menghilangkan atau sedikitnja mengurangi purbasangka itu.

Tertjapainja pengertian jang tepat dan lebih dalam mengenai front persatuan nasional dikalangan kader dan anggota Partai dan dikalangan orang<sup>2</sup> diluar Partai berarti suatu kemenangan bagi perdjuaan menggalang front persatuan nasional itu sendiri. Dibrosurkannya diklat Tentang Front Persatuan Nasional adalah djustru untuk mentjapai maksud ini.

Demikianlah, semoga penerbitan brosur ini akan mentjapai maksudnja.

*Dep. Front Persatuan CC PKI*

*Djakarta, Djuni 1960.*

Sembojan front persatuan nasional telah menjadi buah bibir sehari-hari<sup>2</sup> dikalangan kita kaum Komunis dan dikalangan gerakan Rakjat pekerdja pada umumnya. Pada setiap penutup rapat umum dimana berbitjara orang Komunis atau pemimpin<sup>2</sup> gerakan Rakjat progresif lainnya, begitu juga dalam pernyataan<sup>2</sup> tertulis, selalu diserukan sembojan<sup>2</sup> yang bersangkutan dengan front persatuan nasional.

Ini adalah baik, karena sembojan front persatuan nasional adalah sembojan yang benar dan baik. Terlaksananya sembojan front persatuan nasional dalam praktek menjadi syarat yang menentukan bagi kemenangan kita dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional Indonesia yang penuh. Semakin populer sembojan ini dikalangan Rakjat semakin baik. Oleh karena itu, mempropagandakan dan menjerukan sedit sembojan front persatuan nasional dikalangan Rakjat sudahlah merupakan kebaikan.

Bagi mereka yang sungguh<sup>2</sup> berkemauan dan bermaksud baik, mempropagandakan dan menjerukan sembojan front persatuan nasional berarti juga dorongan dan peringatan bagi diri mereka sendiri untuk berbuat sesuai dengan sembojan yang diserukannya, yaitu berusaha supaya sembojan front persatuan nasional itu tidak tinggal dalam omongan belaka, melainkan menjadi kenyataan dalam praktek.

Djika orang bermaksud menipu Rakjat dengan menggunakan sembojan yang baik ini, hal inipun tidak akan menguntungkan baginya. Sebab dengan sembojan<sup>2</sup> atau andjuran<sup>2</sup> yang benar dan baik, Rakjat akan bisa juga lebih dipertjepat dan ditingkatkan kesedarannya untuk mengudji perbuatan seseorang dengan omongannya. Orang yang bermaksud menipu Rakjat dengan menggunakan sembojan<sup>2</sup> atau andjuran<sup>2</sup> yang baik berarti semakin mempertjepat membukakan kepalsuannya sendiri dimata Rakjat.

Pendeknya, mempropagandakan dan menjerukan sembojan<sup>2</sup> atau andjuran<sup>2</sup> yang benar, bagaimanapun juga, adalah perbuatan yang baik.

Meskipun demikian, didalam praktek sampai sekarang kita masih sering mengalami kesukaran dan rintangan<sup>2</sup> serta kesalahan<sup>2</sup>, jang djustru datangnja dari kalangan kita sendiri, dalam melaksanakan sembojan front persatuan nasional. Sudah tentu sebab dari semuanya ini bukanlah karena kurang atau tidak adanja ke-sungguh<sup>2</sup>an dari fihak kita sendiri didalam mempropagandakan dan melaksanakan sembojan front persatuan nasional itu.

Djadi, dimanakah letak sebabnja?

Sebab jang terutama ialah terletak pada kekurangan pengertian kita mengenai teori dari front persatuan nasional sebagai garis politik atau taktik Partai.

Lebih dulu perlu diperingatkan bahwa pemakaian istilah taktik disini samasekali bukanlah dalam arti kata muslihat jang mengandung tipuan, sebagaimana biasanja dipakai dalam pertjakapan se-hari<sup>2</sup>, terutama dikalangan orang<sup>2</sup> diluar kaum Komunis. Apa jang dimaksudkan dengan taktik oleh kaum Komunis samasekali bukanlah soal tipu-muslihat atau gerak-tipuan. Jang dimaksudkan dengan taktik, djelasnja, taktik Partai, ialah „garis politik dari Partai” (Lenin). Taktik Partai ditetapkan” berdasarkan penilaian jang tenang dan se-mata<sup>2</sup> objektif atas semua kekuatan<sup>2</sup> klas disesuatu negara (dan di-negara<sup>2</sup> tetangga dan semua negara didunia) dan djuga atas pengalaman gerakan<sup>2</sup> revolusioner” (Lenin).

Rintangan<sup>2</sup> dan kesalahan<sup>2</sup> jang datangnja dari kita sendiri dalam melaksanakan garis politik front persatuan nasional haruslah kita hapuskan atau se-tidak<sup>2</sup>nja kita kurangi sampai pada batas minimum. Untuk ini kita perlu mempelajari teori dari politik front persatuan nasional.

Tetapi djika kita nanti sudah mengerti teori dari politik front persatuan nasional, maka hal ini tidaklah berarti bahwa kita terus dengan sendirinja akan bisa dengan gampang dan tepat melaksanakan politik front persatuan nasional itu. Ketjakapan dan ketepatan kita dalam mendjalankan politik front persatuan nasional, sesudah kita banyak-sedikitnja mengerti teorinja, terutama akan kita peroleh dari pekerdjaan praktek se-hari<sup>2</sup>. Djadi, djuga dalam hal ini kita tetap berpegang pada prinsip satunja teori dengan praktek.

Tetapi bagaimanapun djuga, dengan pengertian jang lebih dalam dan tepat mengenai teori dari politik front

persatuan nasional, dapatlah diharapkan bahwa akan timbul dorongan yang lebih besar pada kita untuk lebih sungguh<sup>2</sup> dan lebih tekun lagi didalam menjalankan politik front persatuan nasional. Karena dari pengertian teori ini kita akan menjadi lebih sadar tidak saja akan pentingnja dan keharusan kita menjalankan politik front persatuan nasional, tetapi juga akan kesulitan<sup>2</sup>nja yang berbagai matjam.

Dengan dorongan ke-sungguh<sup>2</sup>an dan ketekunan yang lebih besar, yang didapatkan dari pengertian teori, maka dapatlah ditimbulkan aktivitas dan daya-upaja serta kesabaran yang lebih besar lagi dalam menjalankan politik front persatuan nasional. Dengan demikian, berartilah kita menjtjapkan sjarat<sup>2</sup> untuk bisa meningkatkan ketjapakan dan ketepatan kita dalam menjalankan garis politik front persatuan nasional, dan mengurangi rintangan<sup>2</sup> ideologis serta kesalahan<sup>2</sup> sampai pada batas minimum dari pihak kita sendiri.

Ada lima pokok persoalan dari front persatuan nasional yang kita bitjarakan dibawah ini, yaitu:

*Pertama*, soal ide yang menjadi dasar atau melahirkan politik front persatuan nasional, ialah soal perbedaan revolusi dinegeri djadjahan dan dinegeri imperialis.

*Kedua*, soal basis dari front persatuan nasional, ialah soal persekutuan buruh dan tani.

*Keliga*, soal kebebasan Partai Komunis dalam front persatuan nasional.

*Keempat*, faktor agama dan sukubangsa dalam front persatuan nasional.

*Kelima*, soal organisasi front persatuan nasional.

## **I. PERBEDAAN REVOLUSI DINEGERI DJADJAHAN DAN DINEGERI IMPERIALIS**

Dasar dari politik front persatuan nasional, atau ide yang melahirkan politik front persatuan nasional ialah pendirian Leninis yang membedakan revolusi dinegeri imperialis dengan revolusi dinegeri djadjahan dan negeri tergantung.

Dalam laporannja tentang masalah nasional dan kolonial pada Kongres Kedua Komintern, Lenin ada mengatakan: „Apakah ide yang paling penting dan pokok dari

tesis kita? Ide itu ialah perbedaan antara bangsa<sup>2</sup> tertindas dan bangsa<sup>2</sup> penindas. Kita menekankan perbedaan ini, tidak seperti Internasionale Kedua”.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lenin ini, Stalin memberikan penjelasan bahwa: „Adalah suatu *perbedaan* yang tegas antara revolusi di-negeri<sup>2</sup> imperialis, negeri<sup>2</sup> yang menindas bangsa<sup>2</sup> lain, dan revolusi di-negeri<sup>2</sup> djad-jahan dan negeri<sup>2</sup> tergantung, negeri<sup>2</sup> yang menderita penindasan imperialis dari negara<sup>2</sup> lain. Revolusi di-negeri<sup>2</sup> imperialis adalah satu soal: di-negeri<sup>2</sup> itu burdjuasinja adalah penindas bangsa<sup>2</sup> lain; ia adalah kontra-revolusioner dalam segala tingkatan dari revolusi; *elemen nasional*, sebagai suatu elemen didalam perdjjuangan untuk emansipasi, tidak terdapat di-negeri<sup>2</sup> ini. Revolusi di-negeri<sup>2</sup> djad-jahan dan negeri<sup>2</sup> tergantung adalah soal lain: di-negeri<sup>2</sup> ini penindasan yang dilakukan oleh imperialisme negara<sup>2</sup> lain adalah salahsatu faktor dari revolusi; penindasan ini tidak boleh tidak mengenai burdjuasi nasional djuga; burdjuasi nasional, pada tingkatan tertentu dan untuk masa tertentu, bisa menjokong gerakan revolusioner dinegerinja melawan imperialisme, dan elemen nasional, sebagai suatu elemen didalam perdjjuangan untuk emansipasi, adalah suatu faktor revolusioner. Tidak membikin perbedaan ini, tidak mengerti perbedaan ini dan menjamakan revolusi di-negeri<sup>2</sup> imperialis dengan revolusi di-negeri<sup>2</sup> djad-jahan, adalah menjimpang dari djalan Marxisme, dari djalan Leninisme, dan menempuh djalan dari mereka yang menjokong Internasionale Kedua”.

Revolusi di Rusia tahun 1905, meskipun menurut waktaknja adalah revolusi burdjuis demokratis, ia ditudjukan terhadap burdjuasi, jaitu terhadap burdjuasi liberal. Sebabnja ialah karena burdjuasi liberal dari suatu negara imperialis tidak boleh tidak tentu kontra-revolusioner. Sebagaimana kita ketahui, Rusia tsar pada waktu itu adalah djuga negara yang mendjad-jah bangsa<sup>2</sup> lain. Oleh karena itu, kaum Bolsjewik pada waktu itu tidak dan tidak bisa mempertimbangkan untuk membikin blok dan kerdjasama, meskipun untuk sementara waktu, dengan burdjuasi liberal.

Berbeda dengan revolusi di Tiongkok, yang djuga adalah revolusi burdjuis demokratis, sebelum ia mentjapai

kemenangan dan perkembangannya kerevolusi sosialis, disana kaum Komunis bisa dan perlu membikin blok dan mengadakan kerdjasama dengan burdjuasi nasional. Sebabnya ialah karena Tiongkok adalah negeri yang ditindas, negeri setengah djadjahan, dan dalam revolusinya burdjuasi nasional bisa membantu gerakan revolusioner melawan imperialisme.

Inilah tjontoh sedjarah yang menundjukkan perbedaan pemetjahan masalah revolusi dinegeri imperialis dan revolusi dinegeri djadjahan, meskipun watak kedua<sup>2</sup> revolusi itu sama, yaitu revolusi burdjuis demokratis.

Dengan keterangan diatas ini kiranya tjukup djelas, bahwa pada pokoknya mengerti perbedaan revolusi dinegeri imperialis dan dinegeri djadjahan berarti mengerti bahwa dalam revolusi dinegeri djadjahan gerakan kelas buruh bisa dan perlu membikin blok dan mengadakan kerdjasama dengan burdjuasi nasional, yaitu bisa dan perlu menggalang front persatuan dengan burdjuasi nasional untuk melawan imperialisme asing.

Revolusi dinegeri djadjahan, seperti Revolusi Indonesia, biasa djuga disebut revolusi nasional. Sebabnya ialah karena ia adalah revolusi untuk menjapai kemerdekaan nasional dan untuk mendirikan negara nasional yang merdeka.

Oleh karena itu, berbitjara tentang djalan pemetjahan masalah revolusi dinegeri djadjahan, sama artinja dengan berbitjara tentang djalan pemetjahan masalah gerakan nasional.

Dengan gerakan nasional, atau lengkapnja, gerakan kemerdekaan nasional, dimaksudkan gerakan dari sesuatu nasyon untuk menjapai kemerdekaan nasional dan mendirikan negara nasional yang merdeka. Sebab itu dapatlah dikatakan bahwa revolusi nasional merupakan puntjak dari perkembangan gerakan nasional, ia lahir atau meletus dari gerakan nasional. Dan memang demikianlah yang kita alami dengan revolusi nasional kita, Revolusi Agustus '45.

Berhubung dengan itu, untuk bisa memahami faktor<sup>2</sup> objektif dari politik atau taktik front persatuan nasional, maka kita perlu mengetahui sedjarah dan faktor<sup>2</sup> yang melahirkan gerakan nasional pada umumnya. Kita bisa memperoleh pengertian yang tepat mengenai hal ini dengan mempeladjar buku karangan Stalin: „*Marxisme*

*dan Masalah Nasional*" pada bagian „Gerakan Nasional”.

Untuk kepentingan pendjelasan mengenai faktor<sup>2</sup> objektif dari politik atau taktik front persatuan nasional, dan sebagai bahan perbandingan untuk memahami bentuk<sup>2</sup> dan tjiri<sup>2</sup> dari gerakan nasional kita, maka baiklah kita kutip sebagian besar dari tulisan Stalin itu sbb. :

„Suatu nasyon bukanlah suatu kategori sedjarah semata<sup>2</sup> melainkan suatu kategori sedjarah jang termasuk dalam suatu zaman tertentu, zaman kebangkitan kapitalisme. Proses lenjapnja feodalisme dan perkembangan kapitalisme adalah bersamaan dengan itu suatu proses persatuan orang<sup>2</sup> mendjadi nasyon<sup>2</sup>. Demikianlah halnja, misalnja, di Eropa Barat. Orang<sup>2</sup> Inggeris, Perantjis, Djerman, Italia dan lain<sup>2</sup>nja membentuk diri mendjadi nasyon<sup>2</sup> diwaktu kemadjuan jang djaja dari kapitalisme serta kemenangannja atas perpetjahan feodal.

„Tetapi pada waktu itu terbentuknja nasyon<sup>2</sup> bersamaan dengan itu berarti berubahnja nasyon<sup>2</sup> itu mendjadi negara<sup>2</sup> nasional jang merdeka. Nasyon<sup>2</sup> Inggeris, Perantjis dan nasyon<sup>2</sup> lainnja adalah bersamaan dengan itu negara<sup>2</sup> Inggeris, Perantjis, dsb. Irlandia, jang tidak ikutserta dalam proses ini tidaklah merubah gambaran umumnja.

„Di Eropa Timur djalannja agak berlainan. Sementara di Barat nasyon<sup>2</sup> berkembang mendjadi negara, di Timur terbentuklah negara<sup>2</sup> multi-nasional, masing<sup>2</sup> negara terdiri dari beberapa nasionalitet. Demikianlah halnja dengan Austria-Hongaria dan Rusia. Di Austria, ternyata orang<sup>2</sup> Djerman jang paling maju dalam politik, dan merekalah jang mempersatukan nasionalitet<sup>2</sup> Austria mendjadi suatu negara. Di Hongaria, jang paling sesuai untuk organisasi negara ialah orang<sup>2</sup> Magyar — inti dari nasionalitet<sup>2</sup> Hongaria — dan merekalah jang mempersatukan Hongaria. Di Rusia, peranan sebagai tukang memadukan nasionalitet<sup>2</sup> dipegang oleh orang<sup>2</sup> Rusia-Raja, jang dipelopori oleh suatu birokrasi aristokrat militer, jang telah terbentuk menurut sedjarah dan kuat serta terorganisasi baik.

„Demikianlah halnja di Timur.

„Metode pembentukan negara<sup>2</sup> jang khusus ini dapat berlaku hanjalah ditempat dimana feodalisme belum lenjap, dimana kapitalisme lemah perkembangannja, di-

mana nasionalitet<sup>2</sup> jang telah didorong kebelakang masih belum dapat mengkonsolidasi diri dilapangan ekonomi mendjadi nasion<sup>2</sup> jang integral.

„Tetapi kapitalisme mulai berkembang djuga dinegara<sup>2</sup> Timur. Perniagaan serta alat<sup>2</sup> perhubungan berkembang. Kota<sup>2</sup> besar muntjul. Nasion<sup>2</sup> mendjadi terkonsolidasi dilapangan ekonomi. Kapitalisme, jang melodak didalam kehidupan jang tenang dari nasionalitet<sup>2</sup> jang terdesak, membangkitkan serta menggerakkan mereka untuk bertindak. Perkembangan pers dan teater, aktivitet Reichsrat (Austria) dan Duma (Rusia) membantu memperkuat 'Sentimen<sup>2</sup> nasional'. Inteligensia jang sudah bangun diresapi dengan 'ide nasional' dan bertindak kedjurusang jang sama .....

„Tetapi nasion<sup>2</sup> jang terdesak, jang tergerak untuk hidup merdeka, tak dapat lagi membentuk diri mendjadi negara<sup>2</sup> nasional jang merdeka; mereka mendjumpai perlawanan jang kuat dari lapisan<sup>2</sup> jang berkuasa dari nasion<sup>2</sup> jang memerintah, jang sudah lama memegang kekuasaan negara. Mereka terlambat.

„Setjara inilah orang<sup>2</sup> Tjeko, Polandia dsb., membentuk diri mereka mendjadi nasion<sup>2</sup> di Austria; orang<sup>2</sup> Kroat, dsb., di Hongaria; orang<sup>2</sup> Let, Lithuania, Ukraina, Georgia, Armenia, dsb., di Rusia. Apa jang telah mendjadi perketjualian di Eropa Barat (Irlandia) mendjadi kebiasaan di Timur.

„Di Barat, Irlandia mendjawab kedudukannja jang luarbiasa itu dengan gerakan nasional. Di Timur, nasion<sup>2</sup> jang sudah bangun pasti mendjawab dengan tjara jang sama.

„Dengan begitu timbullah keadaan<sup>2</sup> jang mendorong nasion<sup>2</sup> jang masih muda di Eropa Timur kedjalan perdjuangan.

„Perdjuangan itu mulai dan berkobar, sudah tentu, tidak diantara nasion<sup>2</sup> sebagai keseluruhan tetapi diantara klas<sup>2</sup> berkuasa dari nasion<sup>2</sup> jang memerintah dan nasion<sup>2</sup> jang terdesak. Perdjuangan itu biasanja dilakukan oleh burdjuasi ketjil kota dari nasion jang tertindas terhadap burdjuasi besar dari nasion jang memerintah (bangsa Tjeko dan bangsa Djerman), atau dilakukan oleh burdjuasi desa dari nasion jang tertindas terhadap tuantanah<sup>2</sup> dari nasion jang memerintah (bangsa Ukraina di Polandia), atau oleh seluruh burdjuasi 'nasional'

dari nasion<sup>2</sup> jang tertindas terhadap kaum ningrat jang berkuasa dari nasion jang memerintah (Polandia, Lithuania dan Ukraina di Rusia).

„Burdjuasi memainkan peranan memimpin.

„Masalah utama bagi burdjuasi muda ialah masalah pasar. Tudjuannja ialah mendjual barang<sup>2</sup>nja dan keluar sebagai pemenang dari persaingan dengan burdjuasi dari nasionalitet lain. Karena itu keinginannja ialah mendapatkan pasarnja 'sendiri', pasar 'dalamnegeri'-nja. Pasar adalah sekolah pertama dimana burdjuasi beladjar kenal dengan nasionalismenja.

„Tetapi soalnja biasanja tidak terbatas pada pasar saja. Birokrasi setengah-burdjuis, setengah-feodal, dari nasion jang memerintah tjampur-tangan dalam perdjjuangan dengan metode<sup>2</sup>nja sendiri jaitu metode<sup>2</sup> 'menahan dan mentjegah'. Burdjuasi dari nasion jang memerintah, baik besar atau ketjil, dapat menghadapi saingan<sup>2</sup>nja lebih 'tjepat' dan 'menentukan'. 'Kekuatan<sup>2</sup>' dipersatukan dan serentetan peraturan<sup>2</sup> pembatasan dijalankan terhadap burdjuasi 'asing', peraturan<sup>2</sup> jang berubah mendjadi tindakan<sup>2</sup> penindasan. Perdjjuangan beralih dari lapangan ekonomi kelapangan politik. Pembatasan atas kemerdekaan bergerak, penindasan atas bahasa, pembatasan hakpilih, pembatasan beragama dan seterusnya ditumpuk diatas kepala 'saingan'. Sudah barang tentu peraturan<sup>2</sup> sedemikian itu dimaksudkan tidak hanja untuk kepentingan klas<sup>2</sup> burdjuis dari nasion jang memerintah, tetapi djuga untuk mengedjar tudjuan<sup>2</sup> kasta jang istimewa, boleh dibilang, dari birokrasi jang memerintah. Tetapi dilihat dari sudut hasil<sup>2</sup> jang ditjapai hal ini sama sekali tidak penting: klas<sup>2</sup> burdjuis dan birokrasi dalam hal ini bergandengan tangan — apakah ia itu di Austria — Hongaria atau di Rusia.

„Burdjuasi dari nasion jang terdindas, jang digentjet dalam segala lapangan, sewadjarnjalah bangkit bergerak. Ia berseru kepada 'Rakjat bumiputera'-nja dan mulai menggembar-gemborkan tentang 'tanahair', menjatakan bahwa tudjuannja sendiri adalah tudjuan nasion sebagai keseluruhan. Ia mengumpulkan suatu tentara dari kalangan 'orang<sup>2</sup> setanahairnja' untuk kepentingan ..... 'tanahair'. Djuga 'Rakjat' tidak selalu tinggal diam terhadap seruan<sup>2</sup>nja, mereka berhimpun disekitar pandji<sup>2</sup>-

nja: penindasan dari atas mengenai diri mereka djuga dan menimbulkan ketidak-puasan mereka.

„Dengan begitu mulailah gerakan nasional.

„Kekuatan gerakan nasional ditentukan oleh tingkatan sampai kemana lapisan<sup>2</sup> jang luas dari nasion, proletariat dan kaum tani, turut serta didalamnya.

„Apakah proletariat berhimpun kesekitar pandji<sup>2</sup> nasionalisme burdjuis adalah bergantung pada tingkatan perkembangan kontradiksi<sup>2</sup> klas, pada kesedaran klas serta tingkatan organisasi proletariat. Proletariat jang berkesadaran-klas mempunyai pandji<sup>2</sup>nja sendiri jang sudah terudji, dan ia tak perlu berbaris dibawah pandji<sup>2</sup> burdjuasi.

„Mengenai kaum tani, ikutsertanja mereka dalam gerakan nasional bergantung per-tama<sup>2</sup> pada watak dari-pada penindasan. Djika penindasan itu mengenai 'tanah', seperti halnya di Irlandia, maka massa petani terus berhimpun kesekitar pandji<sup>2</sup> gerakan nasional.

„Sebaliknya, djika misalnja, di Georgia tidak ada nasionalisme *anti-Rusia* jang serius, maka sebabnja jang per-tama<sup>2</sup> jalah karena disana tidak ada tuantanah<sup>2</sup> Rusia atau burdjuasi besar Rusia jang menjediakan bahan-bakar bagi nasionalisme sedemikian itu dikalangan massa. Di Georgia terdapat nasionalisme *anti-Armenia*; tetapi ini adalah karena disana ada burdjuasi besar Armenia jang, karena memukul burdjuasi ketjil Georgia jang masih belum terkonsolidasi, mendorong burdjuasi ketjil Georgia itu kenasionalisme *anti-Armenia*.

„Bergantung pada faktor<sup>2</sup> ini, gerakan nasional itu akan mempunyai watak massal dan terus tumbuh (seperti di Irlandia dan Galicia), atau berubah mendjadi serentetan bentrokan<sup>2</sup> ketjil<sup>2</sup> jang kian lama kian merosot mendjadi pertjektjokan<sup>2</sup> dan 'perkelahian<sup>2</sup>' mengenai papannama<sup>2</sup> (seperti dibeberapa kota di Bohemia).

„Sudah barang tentu sifat dari gerakan nasional itu tidak akan sama di-mana<sup>2</sup>: seluruhnja ditentukan oleh berbagai tuntutan jang diadjukan oleh gerakan. Di Irlandia gerakan itu mempunyai watak agraria, di Bohemia bertalian dengan 'bahasa'; disatu tempat tuntutanja jalah persamaan deradjat warganegara dan kemerdekaan beragama; ditempat lain tuntutanja jalah pegawai<sup>2</sup> dari nasion itu 'sendiri' atau Madjelis sendiri. Berbagai ma-

tjam tuntutan itu tidak djarang menjingkapkan ber-ma-  
tjam<sup>2</sup> tjiri jang menandai suatu nasion pada umumnja  
(bahasa, wilajah, dll.). Perlu diperhatikan bahwa kita  
tidak pernah mendjumpai suatu tuntutan jang bertalian  
dengan 'watak nasional' jang mentjangkum se-gala<sup>2</sup>nja  
dari Bauer. Dan ini adalah wadjar: 'watak nasional' itu  
*dengan sendirinja* adalah sesuatu jang sukar ditangkap  
dan, seperti dengan tepat dinjatakan oleh J. Strasser, 'apa  
jang dapat *diperbuat dengan itu* dalam politik?'

„Demikianlah, pada umumnja, bentuk<sup>2</sup> serta tjiri<sup>2</sup> ge-  
rakan nasional.

„Dari apa jang telah dikatakan tadi mendjadi djelas-  
lah bahwa perdjjuangan nasional didalam keadaan kapi-  
talisme *jang sedang bangkit* adalah satu perdjjuangan dari  
klas<sup>2</sup> burdjuis diantara mereka sendiri. Kadang<sup>2</sup> bur-  
djuasi berhasil menarik proletariat kedalam gerakan na-  
sional, maka perdjjuangan nasional itu pada *lahirnja* se-  
akan<sup>2</sup> mempunjai watak 'senasion'. Tetapi begitu itu  
hanja pada lahirnja sadja. *Pada hakekatnja* ia selamanya  
adalah suatu perdjjuangan burdjuis, suatu perdjjuangan  
jang terutama menguntungkan dan tjotjok bagi burdjuasi.

„Tetapi dari sini tidaklah berarti bahwa proletariat  
lalu tidak boleh melakukan perdjjuangan melawan politik  
penindasan nasional.

„Pembatasan kemerdekaan bergerak, pentjabutan hak-  
pilih, penindasan atas bahasa, pembatasan sekolah<sup>2</sup> dan  
bentuk<sup>2</sup> penindasan lainnja tidak kurang mengenai kaum  
buruh, kalau tidak lebih, daripada burdjuasi. Keadaan  
jang sedemikian itu hanjalah membantu menghambat  
perkembangan setjara bebas dari kekuatan<sup>2</sup> intelek pro-  
letariat dari nasion<sup>2</sup> bawahan (djadjahan). Tak akan  
bisa ada kemungkinan bagi perkembangan sepenuhnya  
dari bakat<sup>2</sup> intelek buruh Tatar atau Jahudi djika dia  
tidak diperbolehkan mempergunakan bahasa aslinja da-  
lam rapat<sup>2</sup> dan tjeramah<sup>2</sup>, dan djika sekolah<sup>2</sup>nja ditutup.

„Tetapi politik penindasan nasional itu berbahaya bagi  
perdjjuangan proletariat djuga dalam arti jang lain. Ia  
mengalihkan perhatian lapisan<sup>2</sup> penduduk jang luas dari  
soal<sup>2</sup> kemasjarakatan, soal<sup>2</sup> perdjjuangan klas, ke-soal<sup>2</sup>  
nasional, soal<sup>2</sup> jang 'umum' bagi proletariat dan bur-  
djuasi. Dan ini mentjiptakan tanah jang baik untuk pro-  
paganda palsu tentang 'keharmonian kepeutingan<sup>2</sup>', un-

tuk menjelubungi kepentingan<sup>2</sup> klas daripada proletariat dan untuk perbudakan intelek daripada kaum buruh. Ini menimbulkan rintangan jang serius bagi pekerdjaan mempersatukan kaum buruh dari semua nasionalitet. Djika sebagian besar dari kaum buruh Polandia masih dalam perbudakan intelek pada kaum nasionalis burdjuis, djika mereka masih menjisihkan diri dari gerakan buruh internasional, maka sebabnja jang utama jalah karena politik anti-Polandia jang ber-abad<sup>2</sup> lamanja dari 'pemerintah jang berkuasa' mentjiptakan tanah bagi perbudakan ini, dan menghalangi pembebasan kaum buruh daripadanya.

„Tetapi politik penindasan itu tidak berhenti disini saja. Tidak djarang ia beralih dari 'sistem' menghasut nasion<sup>2</sup> satu sama lain, kesuatu 'sistem' penjembelihan<sup>2</sup> besar<sup>2</sup>an dan pogrom. Sudah barang tentu jang tersebut belakangan ini tidak selalu dan dimana saja mungkin, tetapi dimana mungkin — dengan tidak adanja hak<sup>2</sup> sivil jang elementer — ia seringkali mengambil bentuk jang mengerikan dan mengantjam akan menenggelamkan tudjuan persatuan kaum buruh dalam darah dan airmata. Kaukasia dan Rusia Selatan memberikan banjak tjontoh. 'Memetjah-belah dan menguasai' — itulah maksud politik menghasut nasion<sup>2</sup> satu sama lain. Dan dimana politik sedemikian itu berhasil sangatlah buruk bagi proletariat dan merupakan rintangan jang serius bagi pekerdjaan mempersatukan kaum buruh dari semua nasionalitet dalam negara”.

Dari tulisan Stalin diatas ini, ketjuali kita mendapatkan pengertian<sup>2</sup> jang djelas dalam berbagai segi mengenai gerakan nasional, kita djuga bisa menarik berbagai pelajaran dan kesimpulan dalam hubungan dengan masalah front persatuan nasional.

Misalnja, dalam tulisan diatas ini Stalin dengan sangat djelas dan mudah difahamkan menerangkan bagaimana hubungannja gerakan nasional dengan proses pembentukan sesuatu nasion dan negara nasional jang merdeka, bahwa gerakan nasional timbul karena penindasan terhadap perkembangan jang wadjar dari sesuatu nasion mendjadi negara nasional jang merdeka.

Kepada kita ditundjukkan bahwa pada zaman bangkitnja kapitalisme dan runtuhnja feodalisme, jaitu zaman lahirnja nasion<sup>2</sup> dan negara<sup>2</sup> nasional (artinja : pada

zaman feodalisme belum ada nasion<sup>2</sup> dan negara<sup>2</sup> nasional), pada zaman itu gerakan nasional dalam hakekatnya ialah selalu perjuangan burdjuis, perjuangan yang terutama menguntungkan dan tjojok bagi burdjuasi. Rol pimpinan dalam gerakan nasional pada waktu itu juga dipegang oleh klas burdjuis. Tetapi dari sini, sekali<sup>2</sup> tidak boleh diartikan bahwa klas buruh tidak boleh ber-sama<sup>2</sup> dengan klas burdjuis melakukan perlawanan terhadap politik penindasan nasional. Sebab politik penindasan nasional tidak kurang, malahan bisa lebih mengenai klas buruh daripada mengenai klas burdjuis sendiri.

Djuga dijelaskan kepada kita bahwa yang menentukan kekuatan gerakan nasional ialah tingkatan sampai dimana klas buruh dan kaum tani turut didalamnya, bahwa berhimpun atau tidaknya klas buruh kesekitar pandji<sup>2</sup> nasionalisme burdjuis adalah bergantung pada tingkatan perkembangan kontradiksi<sup>2</sup> klas, pada kesadaran klas serta tingkatan organisasi proletariat, dan bahwa turutnya kaum tani dalam gerakan nasional bergantung per-tama<sup>2</sup> pada penindasan kekuasaan asing mengenai „tanah”. Dengan pendjelasan ini mengertilah kita bahwa memang ada faktor yang sangat membantu untuk kuatnya gerakan nasional dinegeri kita. Hal ini djika kita ingat bahwa penindasan kolonial Belanda di Indonesia djuga banyak mengenai „tanah”. Malahan penindasan yang mula<sup>2</sup> dilakukan oleh kaum kolonialis Belanda terhadap Rakjat Indonesia ialah mengenai kaum tani, seperti yang dilakukan melalui V.O.C. Ketjuali itu, mayoritas yang sangat besar dari kaum buruh Indonesia bekerja pada perusahaan<sup>2</sup> imperialis, berhubung klas burdjuis Indonesia pada umumnya adalah kapitalis dagang dan lemah. Hal ini berarti tidak memberikan dasar materiil yang kuat untuk adanya kontradiksi yang tajam antara klas buruh Indonesia pada umumnya dengan klas burdjuisnya, dan sampai batas<sup>2</sup> tertentu hal ini membantu dalam penggalangan front persatuan nasional.

Selandjutnya, dalam tulisan Stalin itu dengan djelas djuga ditundjukkan kerugian<sup>2</sup> dan bahaya<sup>2</sup> yang bisa ditimbulkan oleh politik penindasan nasional bagi perjuangan klas buruh, seperti misalnja: terhambatnya perkembangan yang bebas dari kekuatan<sup>2</sup> intelek klas buruh,

mengaburkan perjuangan klas, menimbulkan perbudakan intelek dari kaum buruh kepada kaum nasionalis burdjuis, merintangi persatuan dan solidaritet klas buruh setjara internasional, dsb.

Apakah dalam zaman imperialisme, jaitu zaman bangkitnja kapitalisme, gerakan nasional menjadi tidak lagi mengandung watak burdjuis?

Tentang hal ini Lenin dalam „Laporan Komisi Mengenai Masalah Nasional Dan Kolonial Kepada Kongres Kedua Komintern” (26 Djuli 1920) ada mengatakan: „Tidak perlu diragukan sedikitpun djuga bahwa setiap gerakan nasional tidak bisa lain adalah gerakan burdjuis-demokratis, karena bagian jang sangat besar dari massa penduduk di-negeri<sup>2</sup> terbelakang terdiri dari kaum tani jang mewakili hubungan<sup>2</sup> burdjuis-kapitalis”.

Dengan demikian djelaslah, bahwa nasionalisme seperti jang terdapat pada zaman bangkitnja kapitalisme masih ada djuga pada zaman imperialisme dan zaman peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme sekarang ini. Ia terdapat di-negeri<sup>2</sup> kolonial dan negeri<sup>2</sup> tergantung seperti di-negeri<sup>2</sup> Asia-Afrika pada umumnja dan Amerika Latin. Sebabnja jalah karena klas burdjuis nasional di-negeri<sup>2</sup> ini mempunyai kepentingan<sup>2</sup> jang bertentangan, pertama<sup>2</sup>, dengan kepentingan<sup>2</sup> imperialisme, kedua, dengan kepentingan<sup>2</sup> kekuatan<sup>2</sup> feodal jang terbelakang di-negeri-nja.

Dalam karangannya „Internasionalisme dan Nasionalisme”, Liu Sau-tji ada mengatakan: „Nasionalisme burdjuis di-negeri<sup>2</sup> ini (maksudnja di-negeri<sup>2</sup> kolonial dan semi-kolonial — Mhl.) mempunyai arti progresif jang menentukan djika burdjuasi memobilisasi massa dalam perjuangan melawan imperialisme dan kekuatan<sup>2</sup> feodal. Seperti dinjatakan oleh Lenin (didalam pidato jang diutjapkan pada Kongres Kedua Bangsa<sup>2</sup> Timur), nasionalisme matjam ini 'mempunyai kebenaran sedjarah'. Oleh karena itu, dengan tudjuan menggulingkan kekuasaan imperialisme dan kekuatan<sup>2</sup> feodal, proletariat harus bekerjasama dengan nasionalisme burdjuis jang memainkan rol anti-imperialis dan anti-feodal jang pasti, asal sadja, seperti dikatakan oleh Lenin, bahwa persekutuan<sup>2</sup> ini tidak merintangi kita dalam mendidik dan mengorganisasi kaum tani dan massa luas dari Rakjat jang terhisap didalam semangat revolusioner.

„Tjontoh jang paling terang dari kerdjasama sematjam ini jalah apa jang terdjadi antara kita kaum Komunis Tiongkok dan Sun Jat-sen”.

Pada zaman bangkitnja kapitalisme, karena proletariat masih muda, maka tidak bisa lain bahwa proletariat belum bisa mendjalankan rol memimpin didalam perdjuaan nasional melawan burdjuasi asing. Rol memimpin pada waktu itu dimainkan oleh burdjuasi nasional dan kemenangan komplit daripada perdjuaan nasional waktu itu jalah berdirinja negara nasional jang merdeka jang mendjamin perkembangan kapitalisme lebih landjut.

Sebaliknja, dalam zaman imperialisme, zaman bangkrutnja kapitalisme sekarang ini, perdjuaan nasional melawan imperialisme, artinja djuga melawan burdjuasi asing, tidak mungkin mentjapai kemenangan komplit, kemenangan jang sempurna, djika hegemoni tidak ditangan proletariat.

Tetapi bagaimanapun djuga, dalam gerakan nasional pada ke-dua<sup>2</sup> zaman itu, terdapat kebutuhan objektif jang sama, jaitu kebutuhan akan kerdjasama dan perskutuan antara burdjuasi nasional dan proletariat untuk melawan penindasan nasional.

Tetapi klas burdjuis nasional, meskipun nasional, adalah klas penghisap. Oleh karena itu, antara klas burdjuis nasional dan klas buruh serta Rakjat pkerdja lainnja, jang majoritetnja terdiri dari kaum tani, tetap terdapat pertentangan kepentingan, jaitu tetap terdapat perdjuaan klas. Tetapi karena adanja apa jang dikatakan oleh Stalin „elemen nasional, sebagai suatu elemen dalam perdjuaan untuk emansipasi”, jaitu adanja penindasan terhadap elemen jang mendjadi bagian dari tjiri<sup>2</sup> nasyon, maka didalam revolusi majoritet daripada nasyon, dari burdjuasi nasional sampai kepada kaum buruh dan kaum taninja bisa bekerdjasama dan bersekutu didalam front persatuan nasional anti-imperialisme. Pendeknja dalam front persatuan nasional itu bekerdjasama dan bersekutulah semua kekuatan jang anti-imperialis.

Mengingat kenjataan bahwa kekuatan pokok dari revolusi nasional adalah klas buruh dan kaum tani, sebagai dua kekuatan jang paling konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme serta tidak mempunjai pertentangan kepentingan satu sama lain, maka pada pokoknja masa-

lah front persatuan nasional adalah masalah front persatuan antara kelas buruh dan kaum tani disatu pihak dengan kelas burjuis nasional difihak lain.

Mengukur kekuatan kelas burjuis nasional tidaklah terutama dari jumlah orang yang termasuk dalam kelas itu atau dari kekuatan organisasi partainya, melainkan dari kekuatan pengaruh politik dan ideologinya dikalangan massa Rakyat. Djika dilihat dari jumlah orang dan kekuatan organisasi partainya saja barangkali bisa dikatakan bahwa burjuasi nasional tidaklah besar kekuatannya. Tetapi djika dilihat dari pengaruh politik dan ideologinya maka tidak ragu lagi harus dikatakan bahwa kekuatan burjuasi nasional itu adalah besar.

Dasar pertimbangan yang objektif dari politik front persatuan dengan burjuasi nasional ialah bahwa: *dalam revolusi nasional kelas burjuis nasional bukan saja tidak menjadi sasaran revolusi, tetapi malahan sampai batas tertentu bisa turut mengambil bagian didalam revolusi*

Gerakan nasional atau revolusi nasional adalah pertama<sup>2</sup> perjuangan yang ditudjukan untuk menggulingkan kekuasaan burjuasi asing atau imperialisme. Sebab itu burjuasi asing atau imperialisme menjadi sasaran atau musuh yang utama dan pertama dari gerakan nasional atau revolusi nasional.

Oleh karena itu, berjuang melawan imperialisme bersama kompradornya, yang masih merupakan kekuatan yang besar, dengan tidak menggalang front persatuan dengan burjuasi nasional adalah sama artinya dengan menjalankan politik menumbukkan kepala kepada tembok batu.

## II. PERSEKUTUAN BURUH DAN TANI

Didalam Anggaran Dasar (Preambul Konstitusi) PKI ada diterangkan: „Karena Indonesia adalah negeri yang masih belum merdeka penuh dan masih setengah-feodal, maka revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang ditudjukan untuk melawan imperialisme, feodalisme, burjuasi komprador dan kaum kapitalis birokrat. Tenaga<sup>2</sup> penggerak revolusi Indonesia adalah kaum buruh, kaum tani, kelas burjuis ketjil dan elemen<sup>2</sup> demokratis lainnya, sedangkan tenaga pokoknya adalah kaum tani. Karena sa-

saran<sup>2</sup> dan tenaga<sup>2</sup> penggerak revolusi ini, karena di Indonesia sudah ada Partai Komunis jang makin lama bertambah kuat dan berpengaruh, dan karena keadaan<sup>2</sup> internasional sekarang, semuanya ini menentukan bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi burdjuis-demokratis tipe baru atau revolusi burdjuis-demokratis dalam zaman imperialisme dan revolusi proletar dunia. Revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat jang luas, jang untuk bagian terbesar terdiri dari kaum tani, dibawah pimpinan proletariat."

Dari perumusan diatas teranglah bahwa revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang, meskipun pada dasarnya berwatak burdjuis-demokratis, tetapi tudjuannya bukan lagi terbentuknja masjarakat kapitalis dan negara dibawah diktatur burdjuis, melainkan masjarakat demokrasi baru dan negara dibawah kekuasaan bersama dari semua klas jang revolusioner. Oleh karena itu sudah dengan sendirinja bahwa tugas dan tanggungjawab untuk memimpin revolusi Indonesia supaja bisa mentjapai tudjuannya jang objektif, tidak bisa lain ketjuali djatuh diatas pundak klas buruh. Tegasnja revolusi Indonesia hanja bisa mentjapai kemenangan sempurna berupa kemerdekaan nasional jang penuh djika hegemoni ada ditangan proletariat.

Apakah sjarat<sup>2</sup>nja supaja klas buruh bisa memenuhi tugasnja memimpin revolusi sampai menang?

*Pertama*, seperti diterangkan dalam Program PKI: „Klas buruh harus memelopori perdjjuangan seluruh Rakjat. Untuk tudjuan ini klas buruh sendiri harus meningkatkan aktivitetnja, mendidik dirinja sendiri dan mendjadi kekuatan jang besar dan sedar. Klas buruh tidak hanja harus melakukan perdjjuangan untuk memperbaiki tingkat hidupnja, ia djuga harus meningkatkan tugas<sup>2</sup>nja ketingkatan jang lebih luas dan lebih tinggi. Ia harus membantu perdjjuangan klas<sup>2</sup> lainnja. Klas buruh harus membantu perdjjuangan kaum tani untuk tanah, perdjjuangan inteligensia untuk hak<sup>2</sup>nja jang pokok, perdjjuangan burdjuasi nasional melawan persaingan asing, perdjjuangan seluruh Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan kebebasan<sup>2</sup> demokratis. Rakjat bisa mentjapai kemenangan hanja apabila klas buruh Indonesia sudah merupakan kekuatan jang bebas, sedar, matang

dalam politik, terorganisasi dan mampu memimpin perjuangannya seluruh Rakyat, hanya apabila Rakyat sudah melihat kelas buruh sebagai pemimpinnya".

Tetapi kelas buruh Indonesia mempunyai kelemahan<sup>2</sup> yang tidak bisa dihindari, yaitu: 1) jumlahnya ketjil jika dibandingkan dengan jumlah kaum tani dan lapisan burjuasi ketjil kota, 2) usianya masih muda jika dibandingkan dengan kelas buruh negeri<sup>2</sup> kapitalis yang sudah maju di Eropa, dan 3) tingkat kebudayaannya masih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kebudayaan burjuasi.

Dengan kelemahan<sup>2</sup> ini mengertilah kita betapa menjadi lebih berat dan sukar tugas kelas buruh Indonesia untuk memimpin revolusi. Sebab, dengan jumlah yang ketjil, kelas buruh Indonesia harus cukup mempunyai daya tarik dan daya mempersatukan mayoritas dari massa Rakyat yang jumlahnya berlipat kali jauh lebih besar. Dengan usia yang muda, dan usia muda berarti kurang pengalaman, kelas buruh Indonesia harus bisa memberikan pimpinan kepada perjuangan seluruh Rakyat melawan burjuasi asing yang sudah banjak pengalaman dalam menindas gerakan kelas buruh dan gerakan Rakyat umumnya. Dan dengan tingkat kebudayaan yang masih rendah, kelas buruh Indonesia harus menempati kedudukan yang memberikan pimpinan kepada seluruh gerakan Rakyat, termasuk gerakan kelas burjuis nasional yang dengan sendirinya tingkat kebudayaannya lebih tinggi daripada kelas buruh sendiri.

Semua kelemahan ini adalah kelemahan<sup>2</sup> yang tidak bisa dihindari, karena ia adalah sebagai akibat yang juga tidak bisa dihindari, yaitu akibat penindasan kolonialisme. Tetapi kelemahan<sup>2</sup> yang tidak bisa dihindari ini samasekali tidak berarti bahwa semua itu tidak bisa diatasi.

Berhubung dengan kelemahan pertama, kelemahan dalam hal jumlah ketjil, Dimitrov pernah berkata: „Tetapi, satu soal yang tidak boleh dilupakan: disemua negeri dimana proletariat menurut perbandingan ketjil jumlahnya, dimana kaum tani dan lapisan burjuis ketjil kota jumlahnya jauh lebih besar, maka menjadi lebih<sup>2</sup> penting lagi untuk melakukan segala usaha guna membentuk front persatuan kelas buruh sendiri yang teguh,

supaja ia bisa menempati kedudukannya sebagai faktor pimpinan didalam hubungan dengan semua Rakjat pekerdja”.

Perkataan Dimitrov ini sepenuhnya berlaku untuk Indonesia. Sebab itu djalan yang harus kita tempuh untuk mengatasi kelemahan klas buruh Indonesia dalam hal djumlahnya yang ketjil itu, ialah dengan sungguh<sup>2</sup> mendjalankan apa yang dikatakan oleh Dimitrov, jaitu „melakukan segala usaha guna membentuk front persatuan klas buruh sendiri yang teguh”.

Mengenai kelemahan kedua, kelemahan dalam hal usia muda, yang berarti kurang pengalaman, hal ini bisa diatasi dengan ke-sungguh<sup>2</sup>an dan keradjinan kita didalam mempelajari pengalaman<sup>2</sup> gerakan klas buruh dari negeri<sup>2</sup> kapitalis yang sudah maju, dan chususnja dari pengalaman<sup>2</sup> gerakan klas buruh yang sudah menang. Pengalaman<sup>2</sup> mereka yang sangat kaya itu sudah banjak ditulis mendjadi teori perdjuaan klas buruh berupa literatur Marxis-Leninis, yang sekarang ini disamping sudah banjak terdapat dinegeri kita dan malahan sudah agak banjak yang diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia, djuga sudah mulai diubah dan dipadukan dengan pengalaman revolusi Indonesia dalam bentuk tulisan<sup>2</sup> dari kaum Komunis Indonesia sendiri.

Se-sukar<sup>2</sup>nja perdjuaan klas buruh Indonesia sekarang ini tidaklah begitu sukar seperti perdjuaan klas buruh Rusia yang per-tama<sup>2</sup> mendapat kemenangan. Kesukaran<sup>2</sup> didalam perdjuaan kita sekarang ini bisa mendjadi tidak begitu sukar lagi, dan kesalahan<sup>2</sup> bisa dikurangi atau dihindari, asal sadja kita mau dengan sungguh<sup>2</sup>, setjara teliti dan kritis mempelajari pengalaman<sup>2</sup> gerakan klas buruh yang sudah menang dan gerakan klas buruh dari negeri<sup>2</sup> yang sudah lebih maju.

Pendeknja, ketinggalan dalam pengalaman karena usia yang masih muda bisa kita kedjar dengan beladjar dari pengalaman<sup>2</sup> gerakan klas buruh yang sudah menang dan yang sudah lebih maju.

Djuga mengenai kelemahan yang ketiga, kelemahan dalam hal rendahnya tingkat kebudayaan, ada djalan untuk mengatasinja. Djalan itu ialah dengan sungguh<sup>2</sup> mendjadikan aktivitet beladjar — dari pemberantasan butahuruf sampai kepada beladjar pengetahuan umum — sebagai salahsatu aktivitet yang terpenting, disamping

perjuangan politik dan perjuangan perbaikan nasib se-hari<sup>2</sup>, didalam gerakan klas buruh dan gerakan Rakjat progresif pada umumnja.

Untuk menggalang front persatuan klas buruh, dinegeri kita terdapat faktor<sup>2</sup> objektif jang sangat menguntungkan. Faktor<sup>2</sup> objektif jang menguntungkan itu antara lain, ialah bahwa organisasi<sup>2</sup> buruh di Indonesia telah sama lahir kembali dalam masa Revolusi Agustus '45, jang telah memberikan tradisi persatuan dan tradisi revolusioner jang sangat dalam dikalangan kaum buruh. Dju-ga reformisme jang merupakan tanah subur bagi serikat-buruh<sup>2</sup> dengan pimpinan jang reaksioner tidak mempunjai dasar jang kuat dinegeri kita. Hal ini disebabkan karena kaum buruh dan Rakjat pekerdja umumnja mengalami penghisapan dan penindasan jang luarbiasa, sedangkan kaum imperialis dan burdjuasi kompradornja, jang sudah semakin bangkrut karena tidak gampang lagi dan semakin sempit sumber<sup>2</sup>nja untuk memperoleh keuntungan luarbiasa, mendjadi lebih terbatas sjarat<sup>2</sup>nja untuk melakukan suapan guna mentjiptakan lapisan atas jang agak luas dari klas buruh jang bisa dipergunakan untuk menekan dan memetjah-belah gerakan klas buruh.

Tetapi disamping itu perlu diperingatkan, bahwa djika kemelantaran jang luarbiasa dan merata dinegeri kita tidak memberikan tanah jang subur untuk reformisme, maka sebaliknya ia mendjadi tanah jang subur untuk penyakit radikalisme ke-kiri<sup>2</sup>an dan anarkisme. Untuk melawan penyakit ini kita harus dengan sabar dan ulet mendidik dan melatih massa kaum buruh dan massa pekerdja umumnja dalam praktek aksi<sup>2</sup> setjara terorganisasi dan dengan berpegangan kepada sembojan „aksi ketjil-hasil”.

Berhasilnja penggalangan front persatuan klas buruh ini bergantung pada kader<sup>2</sup> Komunis jang dengan sedat bisa mempergunakan faktor<sup>2</sup> objektif jang sangat menguntungkan dan jang dengan sedat melakukan segala usaha untuk mengatasi kelemahan<sup>2</sup> klas buruh Indonesia jang tidak bisa dihindari itu. Untuk ini kader<sup>2</sup> Komunis jang bekerdja dikalangan kaum buruh harus lebih tjepat dan lebih keras lagi didalam usahanja untuk meninggikan tingkatan politik dan ketjakapannja sebagai trade unionist (orang serikatburuh), supaja bisa lebih banjak membangkitkan kesatuan<sup>2</sup> aksi dari massa kaum buruh, sebagai sendjata jang paling tadjam untuk melawan dan

menelandjangi aktivitet petjah-belah dari pemimpin<sup>2</sup> reaksioner dalam gerakan buruh.

*Kedua*, klas buruh harus bisa menetapkan dan menarik sekutunja jang terbesar dan tepertjaja. Soal sekutu adalah soal jang sangat penting bagi siapa jang hendak menudju dan bersiap untuk memegang kekuasaan negara.

Didalam Anggaran Dasar (Preambul Konstitusi) PKI seperti jang dikutip diatas terdapat kalimat : „Revolusi Demokrasi Rakjat, jaitu revolusi daripada massa Rakjat jang luas .....” Siapakah jang dimaksudkan dengan „massa Rakjat jang luas” didalam kalimat ini?

Karena Rakjat Indonesia sebagian besar adalah kaum tani, maka jang dimaksudkan dengan „massa Rakjat jang luas” itu tidak bisa lain jalah terutama kaum tani. Itulah sebabnja orang djuga suka mengatakan bahwa revolusi agraria, jaitu revolusinja kaum tani. Sebab itu teranglah, bahwa sekutu jang sebenarnya, jang tepertjaja dan jang terbesar dari klas buruh didalam revolusi jalah kaum tani.

Begitu pentingnja kedudukan kaum tani sebagai sekutu bagi proletariat untuk bisa mentjapai dan seterusnya mempertahankan kekuasaan, sehingga dikatakan oleh Stalin : „masalah tani adalah bagian dari masalah umum dari diktatur proletariat, dan dengan demikian mendjadi salahsatu masalah jang vital dari Leninisme”.

Bagaimanakah klas buruh bisa menarik kaum tani mendjadi sekutunja ?

Dengan kaum tani disini terutama dimaksudkan tanimiskin dan tanisedang. Buruhtani sudah terang merupakan proletariat desa, sedangkan kaum tanimiskin, jang merupakan massa tani jang sangat luas, jang tidak mempunyai tanah atau sedikit mempunyai tanah, mereka adalah semi-proletariat desa. Kaum tanisedang pada umumnja tidak melakukan penghisapan, tetapi malahan mengalami penghisapan oleh imperialisme, tuantanah dan burdjuasi. Oleh karena itu, kaum tanisedang bukan sadja bisa turut dalam revolusi anti-imperialis dan revolusi agraria, melainkan djuga bisa menerima Sosialisme. Kaum tanikaja, meskipun mereka tidak bisa kita masukkan sebagai klas tuantanah, karena mereka sendiri pada umumnja masih djuga melakukan pekerdjaan, tetapi mereka disamping menjewakan sebagian dari tanahnja djuga melakukan pekerdjaan sebagai lintahdarat dan menghisap

kaum buruhtani. Oleh karena itu, kaum tanikaja ini paling<sup>2</sup> bisa netral dalam revolusi agraria dan bisa membantu sekedarnja dalam perdjuaan anti-imperialis.

Djadi djelasnja, jang bisa dan harus ditarik dari kaum tani sebagai sekutu klas buruh ialah pada pokoknja kaum tanimiskin dan kaum tanisedang. Untuk menarik mereka sebagai sekutu, maka mereka harus mendapat bantuan dan pimpinan didalam perdjuaan mereka untuk melawan penindasan dan ikatan<sup>2</sup> dari kaum tuan-tanah dan kaum lintahdarat, dan untuk mendapatkan tanah garapan. Mereka harus mendapat bantuan dan pimpinan setjukupnja supaja bisa mengorganisasi diri didalam perdjuaan mereka se-hari<sup>2</sup>. Hal ini hanya bisa ditjapai djika terdapat tjukup banjak kader Komunis jang mengerti betul<sup>2</sup> tentang hubungan agraria, tentang tuntutan<sup>2</sup> serta kehidupan kaum tani dan setjara militan, ichlas serta giat bekerdja dikalangan mereka.

Djelaslah kiranja, bahwa hakekat dari persekutuan buruh dan tani itu terletak dalam politik jang didjalankan oleh Partai Komunis mengenai kaum tani. Oleh karena itu, persekutuan buruh dan tani hanya bisa diwujudkan didalam praktek sebagai hasil dari garis politik Partai Komunis mengenai kaum tani, jaitu sebagai hasil dari aktivitas kaum Komunis didesa jang setjara politik dan organisasi memberikan pimpinan kepada kaum tani.

Ada satu faktor jang menguntungkan untuk tertjiptanja persekutuan buruh dan tani dinegeri kita, ialah karena usianja jang masih muda maka klas buruh Indonesia sebagian besarnja masih dekat sebagai keturunan, dan malahan masih langsung sebagai keluarga kaum tani jang bangkrut. Hal ini disatu fihak mempunyai segi jang merugikan, jaitu masih kuatnja melekat ideologi burdjuis ketjil dari kaum tani dikalangan klas buruh Indonesia, tetapi difihak lain mempunyai segi jang menguntungkan, jaitu terdapatnja pertalian<sup>2</sup> jang wadjar berupa hubungan keluarga antara kaum buruh dan kaum tani jang luas. Dengan pertalian<sup>2</sup> jang wadjar antara kaum buruh dan kaum tani ini, maka aksi<sup>2</sup> dan pengalaman<sup>2</sup> revolusioner dari kaum buruh dikota bisa lebih mudah disampaikan dan disebarkan dikalangan kaum tani didesa.

Djika dua matjam pekerdjaan diatas ini bisa dilaksanakan dengan se-baik<sup>2</sup>nja, jaitu membentuk front persatuan klas buruh jang teguh dan memberikan pimpinan

politik dan organisasi yang setjukepnya dan tepat kepada kaum tani, maka barulah bisa ditjiptakan persekutuan buruh dan tani yang kuat dibawah pimpinan klas buruh. Dengan demikian tertjiptalah basis front persatuan nasional yang luas dan kuat. Tanpa persekutuan buruh dan tani kita tidak bisa bitjara tentang front persatuan nasional yang sesungguhnya, dan kita tidak bisa bitjara tentang kemenangan revolusi.

### III. KEBEBASAN PARTAI KOMUNIS DALAM FRONT PERSATUAN

Seperti sudah diterangkan diatas, masalah front persatuan nasional pada pokoknya adalah masalah front persatuan antara klas buruh dan kaum tani disatu fihak dan klas burdjuis nasional difihak lain. Klas burdjuis nasional adalah klas yang melakukan penghisapan sedangkan klas buruh dan kaum tani (maksudnya kaum tanimiskin dan tanisedang) bukan sadja pada pokoknya tidak melakukan penghisapan tetapi malahan dihisap. Djadi, antara klas burdjuis nasional dan klas buruh serta kaum tani terdapat perbedaan watak dan kepentingan klas.

Bersumber kepada perbedaan watak dan kepentingan klas ini, maka klas buruh dan kaum tani disatu fihak dan klas burdjuis nasional difihak lain, masing<sup>2</sup> mempunyai konsep politik sendiri dalam hubungan dengan penjelesaian revolusi.

Sebagaimana diketahui, dalam hubungan dengan soal penjelesaian tuntutan<sup>2</sup> Revolusi Agustus 1945, kaum buruh, kaum tani, dan burdjuasi ketjil kota, sebagai kekuatan<sup>2</sup> progresif dibawah pimpinan Partai Komunis, mempunyai konsep untuk menghapuskan hak<sup>2</sup> kaum imperialis dilapangan politik, ekonomi dan kebudayaan, dan untuk menghapuskan milik feodal atas tanah serta mengadakan perubahan tanah guna melaksanakan sembojan „tanah untuk petani”. Sedangkan konsep kekuatan tengah, jaitu kekuatan burdjuasi nasional, jalah supaja di Indonesia diadakan perubahan<sup>2</sup> dengan maksud mem-bela kepentingan sendiri untuk perkembangan kapitalisme.

Karena perbedaan konsep ini maka dengan sendirinya diantara klas buruh dan klas burdjuis nasional terdjadi

persaingan untuk bisa memegang hegemoni didalam revolusi.

Apakah bisa digalang front persatuan diantara dua kekuatan, jaitu kekuatan klas buruh dengan sekutunja — kaum tani — dan klas burdjuis nasional, jang mempunyai perbedaan kepentingan dan perbedaan konsep politik dengan tidak salahsatuja meleburkan diri atau melepaskan kebebasannja?

Memang pertentangan kepentingan antara klas buruh dan klas burdjuis nasional, dan perbedaan konsep masing<sup>2</sup> jang menimbulkan persaingan untuk bisa memegang hegemoni didalam revolusi tidak bisa dihindari apa lagi dilenjakkan. Tetapi untuk kepentingan perjuangan melawan musuh bersama, jaitu melawan imperialisme asing, pertentangan antara klas buruh dan klas burdjuis nasional itu bisa diselaraskan. Inilah jang bisa kita namakan menjelaraskan perjuangan klas dengan perjuangan nasional dalam arti jang benar<sup>2</sup> revolusioner.

Apakah jang bisa dijadikan ukuran untuk menetapkan bahwa Partai Komunis sungguh<sup>2</sup> memegang kebebasannja didalam mendjalankan politik front persatuan dengan klas burdjuis nasional?

Karena Partai Komunis mempunyai programnja sendiri dan program itu hanja bisa ditjapai dengan perjuangan revolusioner dari massa, maka ukuran jang harus kita pakai untuk menetapkan kebebasan Partai Komunis dalam front persatuan dengan klas burdjuis nasional ialah, per-tama<sup>2</sup> apakah Partai Komunis itu mendjalankan programnja berdasarkan perjuangan jang revolusioner dari massa ataukah tidak. Kita bisa lebih memahami lagi sjarat<sup>2</sup> atau ukuran<sup>2</sup> dari kebebasan Partai Komunis didalam front persatuan ini djika kita teliti apa jang pernah dikatakan oleh Stalin bahwa : „Suatu front persatuan bisa mempunyai arti revolusioner hanja djika dan kalau ia tidak menghalangi Partai Komunis untuk mendjalankan pekerdjaan politik dan organisasinja jang bebas, hanja djika ia tidak merintanginja untuk mengorganisasi klas proletar menjadi kekuatan politik jang berdiri sendiri, membangkitkan kaum tani melawan kaum tuantana, ..... dan dengan demikian mempersiapkan sjarat<sup>2</sup> jang diperlukan untuk hegemoni dari proletariat”.

Kita telah mengalami bagaimana praktek dari lepasnja kebebasan Partai kita dalam front persatuan nasional

jaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1948. Kesalahan pokok jang menjebabkan lepasnja kebebasan Partai pada waktu itu jalah kesalahan dilapangan politik dan organisasi setjara bersamaan jang saling pengaruh-mempengaruhi. Pada waktu itu kaum Komunis setjara sukarela telah mempertahankan bentuk ilegal dari Partai disamping adanja Partai jang legal, jang ditempatkan pada tempat jang tidak semestinja, dan mendirikan Partai<sup>2</sup> klas buruh lainnja, jalah PBI (Partai Buruh Indonesia) dan Partai Sosialis. Kesalahan dilapangan organisasi ini, seperti diterangkan didalam „Djalan Baru”, telah menjebabkan PKI sebagai Partai dan organisasi samasekali tidak mewujudkan kekuatan jang berarti, dan dalam politik menjebabkan terlampau banjak memberikan konsesi kepada imperialisme dan klas burdjuis.

Kesalahan fundamentil dari Partai jang menondjol pada waktu itu jalah kesalahan dilapangan politik, jaitu kesalahan mengenai persetudjuan Linggardjati dan Renville.

Pada waktu itu kesalahan fundamentil dilapangan organisasi tidak menondjol dimata umum, karena ia tidak difahami oleh umum dan djuga oleh kebanyakan anggota Partai sendiri. *Sumber dari kesalahan dilapangan organisasi ini terletak pada kesalahan pimpinan organisasi jang setjara sukarela menempatkan diri pada kedudukan ilegal atau semi-ilegal. Ini berarti setjara sukarela membatasi aktivitet dan menjempitkan lapangan bergerak dari Partai.* Sudah dengan sendirinja bahwa sebagai akibatnja jang wadjar jalah Partai tidak bisa mendjadi besar dan kuat. Adalah satu prinsip organisasi Partai Komunis bahwa ia tidak boleh *setjara sukarela* bekerdja ilegal atau semi-ilegal.

Dalam „Djalan Baru” lebih landjut ditundjukkan bagaimana kesalahan Partai dilapangan organisasi itu sangat menghambat pertumbuhan kesedaran politik dari massa Rakjat, baik buruh maupun tani, pemuda maupun wanita, massa pradjurit, dsb. Dalam hubungan dengan kaum buruh, misalnja, didalam „Djalan Baru” itu ditundjukkan: „Oleh karena sikap jang anti-Leninis dalam hal politik-organisasi ini, maka dilapangan serikat-buruhpun kaum Komunis dengan demikian telah sangat menghalangi tumbuhnja keinsjafan politik kaum buruh seumumnja sebagai pemimpin Revolusi Nasional. Kaum

Komunis jang memimpin gerakan buruh (serikatburuh) lupa, bahwa menurut Lenin serikatburuh itu adalah sekolahan untuk Komunisme. Melalaikan propaganda Komunisme dikalangan kaum buruh, berarti dengan langsung menghalangi bertambah sedarnja kaum buruh sebagai pemimpin revolusi nasional jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Berarti melupakan arti gerakan kaum buruh sebagai sumber jang terpenting bagi PKI untuk mendapat kader<sup>2</sup>nja". Dan mengenai kaum tani dinjatakan bahwa: „Pengaruh dari kesalahan dalam lapangan organisasi jang telah dilakukan oleh kaum Komunis dengan djelas dan terang nampak djuga dikalangan perdjjuangan tani, dimana pengaruh PKI djuga sangat lemah. Padahal kaum tani amat besar artinja sebagai sekutu kaum buruh dalam Revolusi Nasional. Dengan tidak adanja bantuan jang aktif dari kaum tani, Revolusi Nasional tentu akan kalah".

Djadi, dilepaskannja kebebasan Partai didalam front persatuan nasional berarti pada pokoknja dilepaskannja tugas mengorganisasi kaum buruh dan kaum tani setjara terbuka untuk mempersiapkan sjarat<sup>2</sup> jang diperlukan untuk hegemoni dari proletariat.

Klas burdjuis nasional dan orang<sup>2</sup> jang mengabdikan klas burdjuis, karena disatu fihak menindas klas buruh, atau karena ideologinja sebagai ideologi klas penghisap pada umumnja, dan difihak lain ditindas oleh imperialisme, maka didalam perdjjuangan ia mempunjai watak jang bimbang dan bermuka dua. Disatu fihak ia mau melawan imperialisme, tetapi difihak lain ia kuatir akan kelanjutannya dari revolusi jang bisa mendatangkan kemenangan bagi klas buruh.

Dalam menghadapi watak jang bimbang dan bermuka-dua dari burdjua nasional ini, kaum Komunis bisa membuat dua matjam kesalahan dalam hubungan dengan front persatuan nasional, jaitu kesalahan oportunisme kanan atau oportunisme kiri. Djika Partai Komunis menitikberatkan pada perlunya bersatu sadja dengan burdjua nasional tanpa melakukan perdjjuangan terhadap wataknya jang bimbang dan bermuka-dua itu, maka ia akan menjeleweng mendjalankan kesalahan oportunisme kanan. Tetapi sebaliknya, djika Partai Komunis lebih menitikberatkan pada perdjjuangan dan kurang melihat keharusannja untuk bersatu dengan burdjua nasional,

maka ia akan menjeleweng menjalankan kesalahan oportuniste kiri.

Oleh karena itu, ada dua prinsip yang harus kita pegang teguh dan kita jalankan setjara bersamaan didalam melaksanakan politik front persatuan dengan burdjuasi nasional, jaitu yang *pertama, prinsip bersatu*, dan yang *kedua, prinsip berdjuaug*. Atau djika kedua prinsip ini dipersatukan ia menjadi prinsip „bersatu dan berdjuaug”.

Karena prinsip berdjuaug disini ditudjukan tidak terhadap musuh yang harus dihantjurkan, melainkan terhadap sekutu yang harus ditarik, maka didalam praktek ia harus berupa kritik yang bersifat mendidik untuk merubah. Bagaimanapun djuga tadjamnja kritik itu, ia harus tidak boleh melewati batas, jaitu batas<sup>2</sup> front persatuan.

Menurut pengalaman, tjara melakukan kritik yang tidak tepat terhadap kelemahan<sup>2</sup> burdjuasi nasional bisa berakibat sangat merugikan politik front persatuan nasional. Kritik yang tidak tepat bisa membantu mendorong burdjuasi nasional bertindak reaksioner.

Kita ambillah salahsatu pengalaman yang dimuat didalam Resolusi „Djalan Baru”. Mengenai pemerintah pada waktu itu dikemukakan: „Ternjata bahwa didalam 6 bulan yang belakangan ini, sedjak pimpinan negara dipegang oleh elemen<sup>2</sup> burdjuis komprador, tumbuhnja politik yang reaksioner berdjalan dengan tjepatnja. Malahan pada beberapa bulan yang belakangan sudah tampak tanda<sup>2</sup>, bahwa politik pemerintah yang reaksioner itu akan tumbuh ketinggian kontra-revolusioner”. Dan mengenai sebab<sup>2</sup>nja, antara lain dinjatakan: „Hal ini sebagian disebabkan karena agitasi dan propaganda dari fihak kaum Komunis untuk menjedarkan massa Rakjat pekerdja tentang kekeliruan<sup>2</sup> politik pemerintah, disana-sini telah didjalankan dengan tjara yang kurang bidjaksana, hingga menjinggung perasaan”.

Disamping harus pandai mengemukakan kritik setjara tepat terhadap kebimbangan dan kekeliruan<sup>2</sup> politik dari klas burdjuis nasional, kita harus djuga bisa setjara tepat mendorong dan mempopulerkan sikap dan tindakan yang madju dari kalangan burdjuasi nasional. Dengan tjara mengkritik yang tepat terhadap kebimbangan dan kesalahan<sup>2</sup>, dan mendorong serta memudji yang baik dari

kalangan burdjuasi nasional, maka setiap pernyataan dari kelas buruh dan partainya akan mempunyai daya yang meyakinkan dan berarti memegang inisiatif. Dalam melakukan tugas ini satu soal yang sangat penting untuk selalu diingat, ialah perubahan keadaan: kapan dan dalam hal apa harus ditekankan pada kritik, dan kapan serta dalam hal apa harus ditekankan pada dorongan. Tetapi bagaimanapun juga, didalam mengajukan kritik harus selalu disertai dengan dorongan dan harapan yang berarti memberikan pintu kepada mereka untuk menempuh jalan perbaikan.

Sikap yang tepat menghadapi watak yang bimbang dan bermuka-dua dari burjuasi nasional sangat besar bantuannya dalam mewujudkan front persatuan nasional. Tetapi ada syarat<sup>2</sup> yang menentukan untuk berhasilnya Partai Komunis mempertahankan kebebasannya dan sekaligus menarik kelas burjuis nasional sebagai sekutu didalam front persatuan nasional. Syarat<sup>2</sup> itu ialah:

*Pertama*, Partai harus disatu fihak, terus-menerus berkerja untuk memperluas dan mengkonsolidasi persekutuan buruh dan tani dan difihak lain dengan teguh dan pandai melakukan perjuangan melawan imperialisme dan kekuatan<sup>2</sup> reaksioner didalam negeri. Dengan kekuatan progresif yang besar, serta dengan teguh dan pandai melakukan perjuangan melawan imperialisme dan kekuatan<sup>2</sup> reaksioner didalam negeri, maka kelas burjuis nasional akan bisa ber-angsur<sup>2</sup> ditarik untuk solidier dan didorong untuk lebih teguh sikapnya didalam melawan imperialisme. Senjata yang paling ampuh untuk menarik solidaritet dan mendorong sikap yang lebih teguh dari burdjuasi nasional ialah pukulan<sup>2</sup> yang tepat dan berhasil terhadap kekuatan<sup>2</sup> kaum imperialis dan kakitangannya didalam negeri. Disinilah letak kegunaannya dalam memberikan pukulan<sup>2</sup> yang tepat terhadap kaum imperialis dan kekuatan<sup>2</sup> reaksioner dalam negeri untuk menarik kelas burjuis nasional kedalam front persatuan nasional.

*Kedua*, memperhatikan kepentingan<sup>2</sup> yang masuk-akal dari kelas burjuis nasional. Misalnja, kaum buruh tidak saja sangat memperhitungkan kekuatan modal dari kaum kapitalis nasional dalam hubungan dengan tuntutan<sup>2</sup> perbaikan nasibnja, tetapi juga dengan kuat mem-

bantu perjuangannya mereka untuk mendapatkan perlindungan dan dalam melawan persaingan asing.

*Ketiga*, meluaskan kekuatan<sup>2</sup> yang maju dikalangan kaum burjuis nasional dan mendorong mereka yang termasuk golongan tengah supaya mendjurus ke kiri, membangkitkan mereka yang terbelakang dan mengisolasi mereka yang kepalabatu. Dalam perjuangan ini, perlu memperhatikan perbedaan antara kaum intelektual burjuis dan kaum kapitalis nasional. Kaum intelektual burjuis biasanya tidak mempunyai alat produksi, mereka umumnya bisa menjadi lebih patriotik dan lebih mempunyai pengertian politik, disamping mereka adalah tulang punggung yang menguasai ilmu modern dan kebudayaan. Pengaruh mereka adalah besar dikalangan kaum kapitalis nasional, oleh karena itu sangat penting untuk pertama<sup>2</sup> berusaha menarik mereka ke pihak Rakjat pekerdja.

Partai<sup>2</sup> yang termasuk demokratis diluar Partai Komunis adalah merupakan perwakilan dari kelas burjuis nasional dan burjuis kecil. Oleh karena itu, partai<sup>2</sup> ini bisa dan harus dijadikan saluran untuk mengatur hubungan dan menarik kelas burjuis nasional kedalam front persatuan. Tetapi disamping partai<sup>2</sup> ini harus juga ditjari saluran dengan melalui grup<sup>2</sup> dan tokoh<sup>2</sup> non-partai yang demokratis.

Dari semua keterangan diatas djelaslah, bahwa bisa tertjipta atau tidaknya front persatuan dengan burjuasi nasional adalah, disatu pihak, bergantung kepada sikap burjuasi nasional sendiri, dan di pihak lain, bergantung kepada tepat atau tidaknya politik yang dijalankan oleh Partai Komunis. Bisa terdjadi bahwa politik Partai Komunis sudah tepat, tetapi tekanan kekuatan kaum imperialis begitu rupa besarnya sehingga kelas burjuis nasional bisa menjerah dan meninggalkan front persatuan nasional. Sebaliknya bisa juga terdjadi bahwa faktor<sup>2</sup> objektif sangat menguntungkan untuk menggalang front persatuan dengan burjuasi nasional, tetapi Partai Komunis menjalankan politik yang salah dan tidak tepat, sehingga burjuasi nasional juga lari ke pihak reaksi dan memusuhi front persatuan dengan kelas buruh.

Tetapi bagaimanapun juga dapatlah kita tarik kesimpulan dari pengalaman<sup>2</sup>, bahwa yang terutama menentukan berhasilnya penggalangan front persatuan nasional itu ialah imbalan kekuatan, baik setjara nasional

maupun internasional. Berdasarkan kesimpulan ini kita bisa menyatakan bahwa faktor<sup>2</sup> untuk penggalangan front persatuan nasional dinegeri kita masih tetap menguntungkan. *Pertama*, kita mempunyai Partai Komunis yang cukup besar pengaruhnya. Ini berarti, bahwa kekuatan progresif sudah agak besar. *Kedua*, imbalan kekuatan setjara internasional sekarang ini sudah lebih menguntungkan kekuatan progresif pada umumnya. *Ketiga*, tradisi persatuan cukup kuat dinegeri kita. Jadi, tinggal lagi menambah satu faktor subjektif, yaitu faktor ketjakangan dan ketepatan orang<sup>2</sup> Komunis dalam menjalankan politik front persatuan.

Djika bisa digalang front persatuan yang lama dan teguh dengan burdjuasi nasional sampai selesainya revolusi nasional-demokratis, maka sesudah selesai nanti front persatuan ini akan lebih mempunyai sjarat<sup>2</sup> untuk bisa diteruskan setjara menguntungkan bagi pembangunan Sosialisme.

#### IV. FAKTOR AGAMA DAN SUKU-BANGSA DALAM FRONT PERSATUAN NASIONAL

Seperti sudah diterangkan diatas, pelaksanaan politik front persatuan nasional terutama ditjarkan dasarnya dalam persamaan kepentingan melawan kekuasaan imperialisme asing untuk kemerdekaan nasional yang penuh. Jadi, pokoknya yang bisa dan harus dijadikan dasar untuk mempersatukan mayoritas dari nasion dalam front persatuan nasional ialah berbagai tuntutan gerakan nasional yang pada umumnya berhubungan dengan sjarat<sup>2</sup> yang menjadi tjiri dari nasion (bahasa, wilayah, ekonomi dan kebudayaan).

Tetapi ada faktor lain yang penting juga, yang bisa mempengaruhi pelaksanaan politik front persatuan dalam arti bisa membawa kebulatan atau keretakan dalam front persatuan nasional, yaitu faktor agama dan sukubangsa.

Meskipun Partai sudah bisa dengan tepat mengadakan politik front persatuan nasional, tetapi jika tidak disertai dengan sikap politik Partai yang tepat mengenai agama dan sukubangsa, maka pelaksanaan politik front persatuan nasional itu akan menjadi sangat sukar dan bisa menjadi kurang berhasil.

Agama yang paling berpengaruh di Indonesia ialah

Islam dan kemudian Kristen (Protestan) dan Katolik. Bagi massa Rakjat yang masih terbelakang, perbedaan agama ini sudah bisa menjadi alasan untuk tidak bersatu atau mengurangi eratnja persatuan, dan menutupi kenjataan adanya persamaan kepentingan dilapangan ekonomi dan politik. Pendeknja, ia bukan saja bisa menjelmitu dan mengaburkan perjuangannya kelas, tetapi juga bisa merenggangkan persatuan nasional. Kita bisa melihat hal ini, misalnja, dari kenjataan adanya organisasi massa yang ter-pisah<sup>2</sup> didalam satu lapangan kerja yang terutama hanya didasarkan atas perbedaan agama. Lebih<sup>2</sup> lagi karena kaum imperialis dan kakitangannya memang dengan sengaja mempergunakan agama untuk memetjah-belah massa Rakjat.

Sedar akan besarnya pengaruh agama, terutama agama Islam, dikalangan massa Rakjat, dalam hubungannya dengan pelaksanaan politik front persatuan Kawan Aidit dalam suatu laporan Politbiro kepada Sidang Pleno CC telah memberikan analisa mengenai pembagian masyarakat kita menurut pengaruh aliran<sup>2</sup> politik. Dalam laporan itu diterangkan: „Pada umumnya Rakjat kita dipengaruhi oleh tiga aliran politik, jaitu aliran Komunis, Nasionalis dan Islam. Inilah aliran<sup>2</sup> yang meresap sampai kekalangan Rakjat banjak. Aliran sosialis kanan, sekarang terkenal dengan nama aliran 'soska' (sosialis kanan) yang di Indonesia diwakili oleh PSI, tidak mempunyai pengikut yang luas dikalangan Rakjat banjak. Tetapi dengan ini tidak berarti bahwa aliran 'soska' tidak perlu mendapat perhatian.

„Disamping aliran Komunis dengan tradisi revolusionernja yang gemilang dan heroik, aliran Nasionalis dan Islam juga mempunyai tradisi dalam masyarakat kita. Aliran Nasionalis dan partai politik Nasionalis mulai dikenal oleh Rakjat Indonesia sedjak permulaan abad ke-20, ia dikenal ber-sama<sup>2</sup> dengan lahirnja gerakan nasional dinegeri kita. Agama Islam sudah dikenal ratusan tahun, sedjak agama Islam datang di Indonesia, tetapi partai politik Islam baru dikenal juga sedjak permulaan abad ke-20. Politik dari partai<sup>2</sup> Nasionalis dan partai<sup>2</sup> Islam tergantung pada kelas<sup>2</sup> dari orang<sup>2</sup> yang memimpin partai<sup>2</sup> itu”.

Berdasarkan kenjataan ter-bagi<sup>2</sup>nja masyarakat menurut pengaruh aliran politik, dimana Islam merupakan

salahsatu daripadanya, Kawan Aidit didalam laporan Politbiro jang lain kepada Sidang Pleno CC menjatakan, bahwa PKI menghargai sembojan jang djuga diandjurkan oleh Bung Karno, jaitu sembojan tentang „kerdja-sama kaum Agama, Nasionalis dan Komunis”, karena sembojan ini tjotjok dengan kebutuhan jang mendesak dari Rakjat Indonesia sekarang, jaitu persatuan.

Dengan mengakui ter-bagi<sup>2</sup>nja massa Rakjat menurut aliran<sup>2</sup> politik, hal ini samasekali tidak mengurangi kebenaran bahwa pada achirnja persamaan kepentingan materiil dari massa adalah merupakan pertalian jang lebih kuat daripada pertalian menurut aliran<sup>2</sup> politik. Kawan Aidit mengatakan: „Pengalaman menundjukkan, bahwa massa Nasionalis dan massa Islam tidak sedikit jang setudju pada Partai kita. Djuga massa Nasionalis dan massa Islam jang tidak setudju dengan kita, dan malahan mungkin masih menentang kita, sangat banjak jang melihat adanja persamaan kebutuhan dengan massa Komunis. Satu kenjataan jang tak dapat dibantah, bahwa antara massa Komunis dengan massa Nasionalis dan Islam lebih banjak terdapat titik<sup>2</sup> pertemuan daripada antara orang<sup>2</sup> jang memimpin mereka. Oleh karena itu-lah, perundingan satu dengan lain, saling mendekati dan mengadakan persetudjuan<sup>2</sup> dalam banjak hal adalah mungkin dan djalan inilah jang harus kita tempuh. Kesinilah perhatian harus kita tjurahkan, sebagai salahsatu usaha kita jang penting untuk lebih meluaskan persatuan semua kekuatan nasional.”

Bagi kita aliran Nasionalis sudah terang dasar klasnja Tetapi dengan aliran Islam orang bisa keliru se-akan<sup>2</sup> aliran Islam itu mempunjai dasar klas jang tersendiri atau tidak berdasarkan klas samasekali. Hal ini adalah tidak benar.

Djadi, apakah alasannja sampai kita bisa menghargai sembojan front persatuan nasional jang didasarkan persatuan aliran<sup>2</sup> politik, dimana termasuk didalamnja aliran Islam? Hal ini tidak lain adalah karena didorong oleh kepentingan Partai untuk menundjukkan sikapnja jang menghormati setiap agama, dan dalam hal ini agama Islam jang paling besar pengaruhnja dikalangan massa Rakjat.

■ Sikap menghormati tiap agama ini sudah tentu tidak

berarti bahwa kita tidak harus dengan djelas menjatakan sikap kita jang menentang digunakannya perbedaan agama untuk memetjah-belah persatuan nasional.

Mengenai pentingnja faktor sukubangsa dalam hubungan dengan front persatuan nasional, diwaktu jang lalu masih kurang tjukup mendapat perhatian dan sering terdjadi salah-faham.

Karena selama ini jang populer dan terus dipopulerkan ialah sembojan bahwa kita adalah satu bangsa dalam arti satu nasion, maka mengemukakan masalah suku-bangsa dianggap sebagai hendak mem-bangkit<sup>2</sup>kan perasaan sukubangsa jang dianggapnya sudah lama tidak ada lagi.

Memang ada golongan jang dengan sengadja me-non-djol<sup>2</sup>kan persoalan sukubangsa hanya sekedar untuk mengadu-domba sukubangsa jang satu dengan lainnja dan untuk memetjah-belah persatuan nasional Rakjat Indonesia.

Dulu pemerintah Hindia Belanda djuga mendjalankan politik petjah-belah dengan mengadu-domba sukubangsa. Kaum kolonialis Belanda memupuk perbedaan<sup>2</sup> diantara sukubangsa jang satu dengan lainnja djustru untuk mempertentangkannya satu sama lain. Tetapi karena penindasan dan penghisapan kaum kolonialis Belanda dulu dirasakan langsung lebih berat oleh seluruh Rakjat Indonesia sebagai satu nasion, maka pertentangan<sup>2</sup> jang ditjip-takan oleh Belanda diantara sukubangsa<sup>2</sup> itu bisa dikalahkan oleh pertentangan antara seluruh Rakjat Indonesia sebagai kesatuan dengan kaum kolonialis Belanda.

Sesudah Indonesia memperoleh kemerdekaan politik, keadaan mendjadi agak berbeda dimana Belanda tidak berkuasa lagi setjara langsung. Kaum imperialis dengan menggunakan kaum burdjuis komprador sampai batas<sup>2</sup> tertentu berhasil mem-bangkit<sup>2</sup>kan semangat separatisme dengan menunggangi ketidakpuasan Rakjat di-daerah<sup>2</sup>. Mereka mengabui mata Rakjat dengan menutupi kenyataan, bahwa perbedaan diantara satu daerah dengan lainnja, terutama dalam hal perbedaan madju atau terbelakangnja daerah<sup>2</sup> atau sukubangsa<sup>2</sup> itu, adalah sebagai akibat politik kolonial Belanda selama ratusan tahun di Indonesia.

Adalah wadjar bahwa sesudah Indonesia mentjapai

kemerdekaan politik, Rakjat mengharapkan perbaikan penghidupan setjara lebih tjepat. Karena memang kemerdekaan politik adalah merupakan sendjata dan harus dijadikan sendjata untuk memperbaiki penghidupan Rakjat. Tetapi sudah terang, bahwa apa jang dinamakan daerah bergolak, atau pertentangan antara daerah dengan pusat, adalah terutama ditimbulkan oleh politik imperialis dan keserakahan tokoh<sup>2</sup> lapisan atas dari daerah<sup>2</sup> atau sukubangsa jang hendak menggunakan kemerdekaan politik sekarang ini untuk berkuasa sendiri dan memperkaja diri sendiri.

Sjarat mutlak untuk bisa mengadakan perbaikan penghidupan Rakjat setjara radikal dan memulai pembangunan jang sungguh<sup>2</sup> untuk kepentingan Rakjat diseluruh daerah ialah likwidasi sampai ke-akar<sup>2</sup>nja kekuasaan ekonomi imperialis dan sisa<sup>2</sup> feodalisme. Tetapi kenjataannya, pemimpin<sup>2</sup> separatis dan pemberontak „PRRI”-Permesta jang selalu menggembar-gemborkan sembojan pembangunan daerah samasekali bukannya membawa Rakjat untuk berdjuaug melawan imperialisme dan tuantanah, tetapi mereka malahan bersatu dan mendjalankan politik kaum imperialis dan tuantanah.

Berbeda dengan kaum separatis, kalau kita kaum Komunis mengemukakan persoalan sukubangsa, maka sebabnja ialah djustru karena kita mengetahui adanya perbedaan<sup>2</sup> diantara sukubangsa satu dengan lainnja, baik dalam hal besar ketjilnja, dalam bahasanja, dalam kebudajaannya maupun adat-istiadatnja. Perbedaan<sup>2</sup> ini tidak perlu menjadi bahan perpetjahan asal sadja dipakai prinsip hak sama dan saling menghormati diantara semua sukubangsa dengan tidak memandang besar-ketjilnja dan madju atau terbelakangnja. Djika kenjataan perbedaan<sup>2</sup> sukubangsa ini tidak diperhatikan dan tidak ditjarikan djalan pemetjahan jang tepat, maka perbedaan<sup>2</sup> itu akan tumbuh menjadi benih pertentangan dan perpetjahan dan bisa meretakkan, bahkan bisa menghancurkan samasekali persatuan nasional Rakjat Indonesia.

Bagaimanakah pelaksanaan dari politik hak sama dan saling menghormati diantara semua sukubangsa itu?

Didalam suatu laporan Politbiro kepada Sidang Pleno CC, Kawan Aidit menerangkan : „Pelaksanaan daripada politik hak sama bagi semua sukubangsa adalah politik otonomi bagi sukubangsa<sup>2</sup> dibawah pemerintah jang ber-

sifat kesatuan. Hak otonomi berarti hak mengurus-soal<sup>2</sup> sendiri bagi sukubangsa<sup>2</sup>, misalnja berhak mengurus soal<sup>2</sup> politik dan ekonomi dalam lingkungan sukubangsa masing<sup>2</sup>, berhak memakai bahasa masing<sup>2</sup> disamping bahasa Indonesia dan berhak mengembangkan kebudayaan masing<sup>2</sup>. Politik otonomi sukubangsa inilah satu<sup>2</sup>nja politik jang dapat memetjahkan masalah sukubangsa<sup>2</sup>".

Mengenai apa jang dinamakan otonomi di Indonesia, Kawan Aidit mendjelaskan: „Kenjataan sekarang menundiukkan, bahwa soal otonomi jang sekarang banjak dibitjarakan bukanlah otonomi jang berdasarkan suku-bangsa, akan tetapi berdasarkan daerah administratif dan disebut 'otonomi daerah'. Pembagian administratif pemerintahan sekarang pada pokoknja masih meneruskan pembagian administratif zaman kolonial dulu. Dalam rangka program tuntutan sekarang, PKI dapat menjetudjui 'otonomi daerah', diadi belum otonomi sukubangsa, asal untuk daerah<sup>2</sup> itu diadakan pemilihan DPRD<sup>2</sup> setjara demokratis, dan dibentuk DPD<sup>2</sup> berdasarkan perwakilan berimbang. Tetapi ini adalah pemetjahan sementara selama belum dibentuk otonomi<sup>2</sup> berdasarkan suku-bangsa.

„Djadi, kita tidak boleh berhenti sampai pada 'otonomi daerah' sadja. Bersamaan dengan menerima 'otonomi daerah', kita harus menjelidiki dan menjimpulkan persoalan<sup>2</sup> sukubangsa<sup>2</sup>, misalnja soal batas<sup>2</sup> daerah dimana sesuatu sukubangsa hidup, soal kesatuan bahasa dan kebudayaan dari tiap<sup>2</sup> sukubangsa, dsb. Berdasarkan hasil<sup>2</sup> penjelidikan dan kesimpulan ini ber-angsur<sup>2</sup> kita mendirikan otonomi<sup>2</sup> berdasarkan sukubangsa<sup>2</sup>, sesuai dengan kepentingan seluruh bangsa".

Selanjutnja diterangkan oleh Kawan Aidit bahwa: „Dalam memetjahkan masalah sukubangsa kita harus mentjegah timbulnja perasaan tinggihati pada sukubangsa jang besar, kita harus mentjegah sukubangsa besar-isme. Djuga kita harus mentjegah sukubangsa jang besar dan jang sudah lebih maju memandang rendah sukubangsa<sup>2</sup> lainnja dan memaksakan keinginannja sekalipun mungkin dengan maksud untuk memajukan sukubangsa<sup>2</sup> lainnja itu. Pendeknja, tiap<sup>2</sup> sukubangsa harus maju dengan tiada paksaan dari sukubangsa lain. Sukubangsa jang sudah maju harus mempunyai perasaan berkewajiban

membantu sukubangsa<sup>2</sup> lain, tetapi pelaksanaan daripada kewadajiban ini tidak boleh dengan memaksa. Sukubangsa jang besar harus menghormati sukubangsa<sup>2</sup> jang ketjil. Djikalau ada kekurangan<sup>2</sup> didalam pekerdjaan mengatur negeri maka jang per-tama<sup>2</sup> harus mengadakan selfkritik jalah sukubangsa jang besar dan sudah madju.

„Dikalangan sukubangsa<sup>2</sup> ketjil kita harus mentjegah timbu'nja sukubangsa-isme jang sempit, jang sifatnja tidak mau menerima segala sesuatu dari sukubangsa lain. Sukubangsa-isme sempit membikin lambat kemandjiaan sukubangsa itu sendiri. Disamping itu sukubangsa-isme sempit mudah digunakan oleh kaum imperialis untuk mengadu-domba antara sukubangsa<sup>2</sup> dan untuk memetjah-belah persatuan Rakjat Indonesia. Ini berarti memetjah-belah dan sangat memperlemah kedudukan Republik Indonesia jang bersifat kesatuan. Djuga perasaan merasa ketjil-diri harus ditjegah dikalangan sukubangsa<sup>2</sup> tersebut karena perasaan ini djuga merupakan perintang bagi kemandjiaan sukubangsa<sup>2</sup> jang bersangkutan”.

Dalam hubungan dengan pekerdjaan front persatuan nasional, harus djuga kita masukkan pekerdjaan dikalangan minoritet keturunan asing. Tentang ini Kawan Aidit mengatakan: „Disamping masalah sukubangsa<sup>2</sup> ada lagi masalah lain jang hampir sama persoalannya, jaitu masalah minoritet keturunan asing, misalnja keturunan Arab, Eropa dan Tionghoa. Golongan minoritet ini berbeda dengan sukubangsa<sup>2</sup>, karena minoritet keturunan asing ini walaupun mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri, tetapi tidak mempunyai daerah tempat tinggal jang tertentu. Oleh karena itu pemetjahan masalah minoritet keturunan asing lebih sukar. Tetapi ini tidak berarti bahwa soal ini tidak bisa dipetjahkan. Pemetjahan soal ini djuga hanja bisa dengan politik hak sama, jaitu hak sama semua warganegara. Djadi soalnya jalah, dengan konsekwen mendjalankan apa jang tertjantum dalam UUD tentang haksama bagi semua warganegara.

„Berhubung dengan pemetjahan masalah minoritet keturunan asing, disatu fihak harus ditjegah timbulnja nasionalisme sempit dikalangan majoritet warganegara 'bumiputera'. Jang terachir ini harus menghormati minoritet warganegara keturunan asing. Difihak lain harus dihilangkan rasa superior (tinggihati) golongan atas daripada minoritet keturunan asing jang dizaman pendja-

djahan memang dipupuk oleh kaum pendjadjah untuk dapat diadu-dombakan dengan mayoritas 'bumiputera'. Pendidikan patriotisme Indonesia, pendidikan tjinta tanahair dan tjinta Rakjat Indonesia, harus diperdalam dan diperluas dikalangan minoritet keturunan asing. Ini tidak berarti bahwa pendidikan patriotisme Indonesia dikalangan warganegara 'bumiputera' sudah tidak diperlukan".

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam pekerjaan front persatuan faktor agama dan sukubangsa ini seringkali terjalin menjadi satu. Suatu sikap yang tidak tepat mengenai sesuatu agama yang kebetulan dianut oleh mayoritas dari massa sesuatu sukubangsa, bisa dianggap sebagai langsung menyinggung juga seluruh sukubangsa itu. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa merasa tersinggung kepertjajaan agamanya jika perasaan sukubangsanya tersinggung.

Itulah sebabnya tokoh<sup>2</sup> agama atau sukubangsa yang meskipun kadang<sup>2</sup> politiknya sudah dikenal reaksioner, masih juga belum ditentang oleh massa Rakjat yang bersamaan agama atau sukubangsanya.

Oleh karena itu, membangkitkan kesadaran politik dari massa yang masih terbelakang, yang ada dibawah pengaruh tokoh<sup>2</sup> agama atau sukubangsa adalah sangat sukar jika tidak mendapat bantuan dari tokoh<sup>2</sup> itu, apalagi jika mendapat tentangan dari mereka. Oleh karena itu, untuk bisa melaksanakan politik front persatuan nasional, adalah juga sangat penting bagi kita untuk berusaha menarik dan bekerjasama dengan tokoh<sup>2</sup> agama dan sukubangsa dari pusat sampai ke-daerah<sup>2</sup>.

Dengan menjatakan pentingnya usaha menarik dan bekerjasama dengan tokoh<sup>2</sup> agama dan sukubangsa, tidaklah berarti bahwa pekerjaan membangkitkan massa yang masih terbelakang dan menganut sesuatu agama di-daerah<sup>2</sup> sukubangsa harus selalu dengan perantaraan tokoh<sup>2</sup> agama dan sukubangsa. Yang paling penting dan menentukan dalam hal ini ialah sikap dan pandangan kita yang tepat mengenai agama dan sukubangsa.

Seperti sudah diterangkan diatas, mengenai agama, sikap kita ialah menghormati setiap kepertjajaan agama. Dengan sikap menghormati kepertjajaan agama kita bisa memegang inisiatif yang besar dilapangan politik. Sikap

jang sebaliknya akan menjebakkan kita berkedudukan pasif dilapangan politik.

Salahsatu tjontoh jang barangkali bisa mejakinkan dalam hal ini ialah sikap Partai kita mengenai Pantjasila. Sebab, kita bisa melihat dengan njata betapa besar arti politik dan akibat bagi kaum reaksioner jang biasa menggunakan agama sebagai kedok dalam perdjuaan politiknya, seperti kaum reaksioner dari Masjumi, dengan sikap Partai kita jang menerima Pantjasila. Dan dasar pertimbangan jang penting untuk mengambil sikap menerima Pantjasila ini ialah antara lain karena sikap kita jang menghormati setiap kepertjajaan agama.

Mengenai soal sukubangsa, seluruh keterangan diatas adalah dimaksudkan untuk memberikan kejakinan bahwa memang soal sukubangsa dan minoritet keturunan asing merupakan persoalan jang serius jang harus mendapatkan pemetjahannya setjara tepat. Adalah keliru dan berbahaya anggapan jang menjatakan se-akan<sup>2</sup> tidak ada soal<sup>2</sup> sukubangsa dan minoritet keturunan asing, bahwa adanya soal<sup>2</sup> ini hanya karena ditimbulkan oleh politik kita sendiri.

Kenjataan bahwa kaum reaksioner dari Masjumi-PSI telah dapat menggunakan sentimen sukubangsa untuk menimbulkan gerakan separatis dan pemberontakan „PRRI“-Permesta, dan menggunakan sentimen rasial anti-Tionghoa untuk merusak kesatuan kewarganegaraan Republik Indonesia, hendaknja kenjataan<sup>2</sup> ini bisa menghapuskan anggapan<sup>2</sup> jang keliru jang mengabaikan persoalan sukubangsa dan minoritet keturunan asing.

Satu<sup>2</sup>nja politik jang dapat memetjahkan masalah sukubangsa ialah politik otonomi sukubangsa sebagai pelaksanaan dari prinsip hak sama dan saling menghormati diantara semua sukubangsa dengan tidak memandang perbedaan besar-ketjilnja dan madju atau terbelakangnja. Sedang untuk memetjahkan masalah minoritet keturunan asing ialah pada pokoknja dilaksanakan setjara konsekwen dan sepenuhnya prinsip hak sama dari semua warganegara dengan tidak memandang asal keturunan atau kejakinan politik dan kepertjajaan agamanya.

Aspirasi atau tjita<sup>2</sup> setiap sukubangsa, misalnja keinginan untuk melihat kemandjuan kebudayaan sukubangsanya dan untuk melihat adanya pemimpin<sup>2</sup> Rakjat dan

pemimpin<sup>2</sup> pemerintahan, se-tidak<sup>2</sup>nja pemerintahan daerah, dari sukubangsanya hanya bisa dipenuhi dengan memberikan otonomi sukubangsa. Djika otonomi sukubangsa ini dilaksanakan dibawah Pemerintah Kesatuan Republik Indonesia, maka hasilnya tidak bisa lain ialah persamaan kedudukan, saling pertjaja dan kerdjasama serta persatuan yang lebih erat dan lebih teguh lagi dari semua sukubangsa dalam kesatuan nasyon Indonesia.

Karena dibawah kekuasaan dan dalam tingkat perjuangan sekarang ini belum bisa dilaksanakan otonomi sukubangsa, maka sudah akan memadai jika otonomi daerah berdasarkan Undang<sup>2</sup> No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok<sup>2</sup> Pemerintahan Daerah dilaksanakan sepenuhnya dan dengan konsekwen. Djika otonomi daerah ini sungguh<sup>2</sup> dilaksanakan setjara demokratis, maka hal ini sebenarnya berarti pendemokrasian pemerintahan daerah. Dengan pemerintahan daerah yang demokratis, dimana ada DPRD dan DPD-nja yang dipilih oleh Rakjat di daerah masing<sup>2</sup>, maka tuntutan<sup>2</sup> Rakjat daerah untuk sebagiannya bisa ditampung dan dipetjahkan oleh Rakjat daerah sendiri.

Pada umumnya apa yang dinamakan tuntutan<sup>2</sup> daerah atau tuntutan<sup>2</sup> Rakjat daerah, pada hakekatnya adalah tuntutan<sup>2</sup> sukubangsa. Dengan demikian djelaslah, bahwa otonomi daerah atau pendemokrasian pemerintahan daerah sesungguhnya bisa merupakan senjata yang baik untuk melawan hasutan<sup>2</sup> kaum separatis dan pemberontak yang selalu menggembar-gemborkan sembojan kosong tentang memperhatikan kepentingan daerah atau tentang pembangunan daerah.

Oleh karena itu, adalah keliru dan akan mentjapai hasil yang sebaliknya, djika ada orang yang disatu pihak, menghendaki kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih teguh, tetapi, difihak lain, tidak menjetudjui dan malahan merintangi pelaksanaan otonomi daerah seperti yang dikehendaki oleh Undang<sup>2</sup> No. 1 Tahun 1957.

Untuk bisa melaksanakan dengan baik politik mengenai sukubangsa dan minoritet keturunan asing, diperlukan politik pemeliharaan dan penempatan kader sukubangsa dan kader pusat setjara tepat, baik didalam Partai, didalam organisasi<sup>2</sup> massa Rakjat, maupun didalam pemerintahan.

Terhadap kader sukubangsa, kita harus memberikan perlakuan dan pemeliharaan yang istimewa dalam hal mengutamakan kesempatan beladjar bagi mereka. Kita harus tidak boleh ragu<sup>2</sup> dalam memberikan kesempatan akan berakibat mengganggu pkerdjaannja untuk sementara waktu.

Mengenai kader dari pusat yang akan ditempatkan di-daerah<sup>2</sup> sukubangsa, maka sjarat<sup>2</sup>nja yang penting, disamping ketjakapan dan keuletan, ialah terutama keichlasan dan kedjudjuran untuk membantu daerah. Sjarat<sup>2</sup> ini sungguh diperlukan supaya penempatan kader dari pusat bisa berhasil baik dengan mentjiptakan kerdjasama yang baik dan persatuan yang erat antara kader yang dari pusat dan kader daerah.

Sudah tentu, difihak lain, diperlukan djuga sjarat<sup>2</sup> keichlasan dari kader<sup>2</sup> daerah (sukubangsa) untuk menerima bantuan kader<sup>2</sup> dari pusat.

Berbitjara tentang sjarat<sup>2</sup> penempatan kader dari pusat di-daerah<sup>2</sup>, dalam hal ini yang kita maksudkan bukan sadja penempatan kader dari pusat di Daerah<sup>2</sup> Besar, tetapi djuga penempatan kader<sup>2</sup> dari „pusat” Daerah Besar di-daerah<sup>2</sup> dalam lingkungan Daerah Besar itu sendiri.

Dalam hubungan dengan pemetjahan masalah bangsa<sup>2</sup> minoritet di Tiongkok, Mau Tse-tung pernah mengatakan : „Adalah mustahil untuk memetjahkan soal bangsa<sup>2</sup> minoritet dengan konsekwen dan mengisolasi samasekali kaum reaksioner dari berbagai bangsa minoritet djika tidak ada sedjumlah besar kader Komunis yang berasal dari bangsa<sup>2</sup> minoritet”.

Apa yang dikatakan oleh Mau Tse-tung ini sepenuhnya berlaku bagi Partai kita dan pemetjahan soal sukubangsa<sup>2</sup> dinegeri kita. Disinilah pentingnja politik pemeliharaan dan penempatan kader sukubangsa yang setjara tepat.

## V. SOAL ORGANISASI FRONT PERSATUAN NASIONAL

Djika kita sampai merasa perlu mengemukakan soal organisasi front persatuan nasional disini, maka sebabnja bukanlah karena soal organisasi ini merupakan soal yang sama penting dan fundamentilnja seperti soal<sup>2</sup> lain dari

front persatuan nasional jang sudah diterangkan diatas.

Soal front persatuan nasional memang per-tama<sup>2</sup> bukanlah soal organisasi, melainkan, seperti sudah diterangkan dalam pendahuluan, adalah soal garis politik, soal taktik dari Partai.

Djadi, apakah maksudnja kita kemukakan djuga soal organisasi front persatuan nasional itu disini?

Maksudnja jalah hanya sekedar memberikan pendjelasan guna menghapuskan pengertian jang kaku dan formil mengenai organisasi, chususnja organisasi front persatuan nasional.

Untuk beberapa waktu sesudah adanja Resolusi „Djalan Baru”, dikalangan kita kaum Komunis agak luas djuga terdapat fikiran jang kaku dan formil mengenai organisasi front persatuan nasional.

Didalam „Djalan Baru” ada dinjatakan: „Walaupun kemudian mereka mulai sadar akan kepentingan Front Nasional itu, akan tetapi kaum Komunis belum faham sungguh<sup>2</sup> tentang hakekat Front Nasional dan tentang tjara membentuknja. Beberapa matjam bentuk Front Nasional selama tiga tahun ini telah didirikan, akan tetapi selalu tinggal diatas kertas belaka, hanya berupa konvensi diantara organisasi<sup>2</sup> atau diantara pemimpin<sup>2</sup> sadja, sehingga dijkalau ada sedikit perselisihan diantara pemimpin<sup>2</sup> Front Nasional itu lalu menjebakkan bubarnja”.

Selandjutnja dalam hubungan dengan bentuk atau organisasi Front Nasional, didalam „Djalan Baru” diterangkan: „Front Nasional jang tulen harus disusun dari bawah, semua anggota partai<sup>2</sup> jang sudah menjetudjui Front Nasional seharusnja memasukinja setjara individu. Selain daripada itu diberi djuga kesempatan kepada beribu orang jang tidak berpartai dan jang progresif turut serta dalam Front Nasional. Komite<sup>2</sup> Front Nasional, baik didaerah maupun dipusat, harus dipilih setjara demokratis dari bawah. Front Nasional sematjam ini, sekali berdiri tidak akan mudah hantjur, bahkan tidak terlalu bergantung lagi kepada kehendak pemimpin<sup>2</sup> partai. Front Nasional sematjam itu memungkinkan djuga pengurangan perselisihan politik dan djuga memperketjil adanja oposisi sampai pada batas minimum”.

Dengan menafsirkan setjara berat sebelah apa jang dinjatakan didalam „Djalan Baru” itu, dikalangan kita telah timbul sematjam semangat anti, atau menjalahkan,

djika kita kaum Komunis menjetudjui dan turut dalam badan<sup>2</sup> kerdjasama diantara partai<sup>2</sup> dan organisasi<sup>2</sup> jang tidak memakai nama Front Nasional dan tidak beranggotakan setjara perseorangan, dan hanja merupakan pertemuan<sup>2</sup> diantara pimpinan<sup>2</sup>nja sadja. Kerdjasama<sup>2</sup> sematjam ini mau diremehkan begitu sadja, karena dianggapnja bukanlah merupakan Front Nasional. Menurut anggapaannja, jang dinamakan Front Nasional haruslah berupa organisasi jang memakai nama Front Nasional dan mempunyai keanggotaan setjara perseorangan.

Tafsiran sematjam ini mengenai Front Nasional jang diterangkan didalam „Djalan Baru” adalah tafsiran jang berat sebelah. Sebab, dengan demikian se-akan<sup>2</sup> „Djalan Baru” mengkritik kaum Komunis pada waktu itu hanja dalam hal belum faham sungguh<sup>2</sup> tentang tjara membentuk Front Nasional, dan bukannya per-tama<sup>2</sup> bahwa kaum Komunis pada waktu itu belum faham sungguh<sup>2</sup> tentang hakekat Front Persatuan Nasional.

Padahal dalam „Djalan Baru” itu sendiri, dalam kalimat jang menundjukkan kekurangan pengertian kaum Komunis tentang Front Persatuan Nasional pada waktu itu, djustru jang disebutkan per-tama<sup>2</sup> ialah bahwa „kaum Komunis belum faham sungguh<sup>2</sup> tentang hakekat Front Persatuan Nasional”.

Djuga didalam „Djalan Baru” ada diterangkan: „Oleh karena pada dewasa ini telah ada program nasional jang sudah disusun, disetudjui dan diterima pula oleh semua partai, maka tidak salah djika program nasional ini dipakai dengan segera sebagai dasar untuk mewujudkan Front Nasional”, dan bahwa „Front Nasional jang tulen harus disusun dari bawah”.

Apakah artinja ini?

Ini berarti bahwa Front Nasional jang tulen ialah Front Nasional jang dilahirkan oleh suatu program jang bisa mempersatukan dan membangkitkan aksi<sup>2</sup> bersama dari berbagai golongan massa Rakjat. Ini berarti bahwa kaum Komunis harus bisa merumuskan tuntutan<sup>2</sup> atau program jang mengenai kepentingan bersama dari berbagai golongan massa Rakjat, dan berdasarkan tuntutan<sup>2</sup> atau program itu mengadakan berbagai bentuk kerdjasama untuk melaksanakan aksi<sup>2</sup> bersama dari berbagai kalangan massa Rakjat dan mengenai berbagai lapangan, seperti lapangan ekonomi, politik, kebudajaan, dsb.

Oleh karena itu, seperti halnya wujud dari persekutuan buruh dan tani tidak harus dilihat dari adanya bentuk organisasi yang formil, yang mempersatukan kaum buruh dan kaum tani, melainkan harus dilihat dari adanya gerakan dan aksi<sup>2</sup> kaum tani yang terorganisasi, sebagai hasil dari pelaksanaan politik Partai Komunis mengenai kaum tani, yaitu sebagai hasil dari aktivitas kaum Komunis di desa yang setjara politik dan organisasi memberikan pimpinan kepada kaum tani, maka juga wujud daripada front persatuan nasional tidak pertama<sup>2</sup> harus dilihat dari adanya organisasi front persatuan nasional yang formil, yang mempunyai anggota<sup>2</sup> perseorangan dari kaum buruh, tani, burdjuis nasional, dsb., melainkan dari adanya gerakan Rakjat yang luas dari berbagai klas yang revolusioner, sebagai perwujudan daripada perjuangannya melaksanakan suatu program, atau bagian<sup>2</sup> dari program, yang meliputi kepentingan semua klas yang anti-imperialis untuk menjapai kemerdekaan nasional yang penuh.

Front nasional dalam bentuk organisasi biasanya lahir pada waktu meningkatnya perjuangan nasional atau naiknya gelombang revolusi.

Program Partai kita adalah program yang meliputi kepentingan massa Rakjat dari semua klas yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Ia bisa dan harus kita pakai sebagai dasar untuk mengadakan kesatuan<sup>2</sup> aksi dari berbagai golongan massa Rakjat dan mengenai berbagai soal yang langsung menjangkut kepentingan massa Rakjat dan kepentingan nasional. Program Partai kita adalah Program yang seluruhnya atau bagian<sup>2</sup>nja bisa dijadikan dasar untuk mewujudkan front persatuan nasional. Sebab itu, Program Partai kita adalah sesungguhnya suatu program nasional, suatu program yang berisi tuntutan<sup>2</sup> yang meliputi kepentingan nasional.

Sudah jelaslah kiranya bahwa satu elemen pokok yang bisa menjadi semen persatuan dimana saja dan di waktu kapan saja ialah: kesatuan dalam aksi mengenai soal<sup>2</sup> yang langsung bersangkutan dengan kepentingan massa Rakjat.

Oleh karena itu, sesudah kita mempunyai politik atau program yang tepat, maka jalan untuk menjapai persatuan dari berbagai golongan massa Rakjat dan untuk menjapai persatuan nasional, bukanlah pertama<sup>2</sup> menjarikan bagaimana bentuk organisasinya yang formil,

melainkan bagaimana mengemukakan politik atau program itu dengan kata<sup>2</sup> dan tjara<sup>2</sup> jang bisa difahami oleh berbagai golongan massa Rakjat, dengan menghindari pemakaian sembojan<sup>2</sup> kosong serta sikap angkuh: „terima atau tidak!”

Sikap sederhana dan rendah hati didalam mendjalankan politik front persatuan adalah sangat penting. Terhadap mereka jang mau bekerdjasama dengan kita, kita harus menundjukkan bahwa kita sungguh<sup>2</sup> mau beladjar dari mereka, bahwa kita tidak mau memaksakan pendapat<sup>2</sup> kita kepada orang lain. Disatu fihak, kita harus pertjaja bahwa orang lain djuga bisa melakukan sesuatu seperti kita, tetapi, difihak lain, kita tidak boleh mengharap orang lain sepenuhnya seperti kita. Kita harus mendidik diri kita untuk bisa bergaul dan bisa berunding dengan orang lain, dan disamping berusaha mendjadi teladan didalam kesetiaan mendjalankan putusan<sup>2</sup> bersama, kita harus menghindari memonopoli semua kedudukan atau pekerdjaan didalam front persatuan.

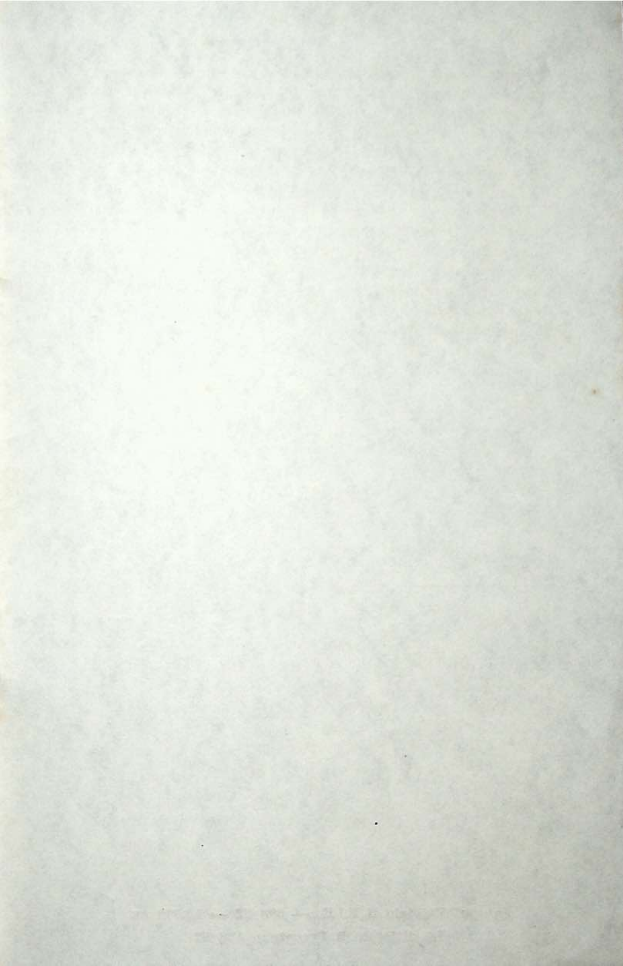
Untuk kesempurnaan tjara kerdja dalam mendjalankan politik front persatuan nasional, sangat pentinglah djika kita ingat dan kita djadikan pedoman dalam aktivitet kita se-hari<sup>2</sup>, apa jang dikatakan oleh Mau Tje-tung, sbb.:

„Dalam bekerdja untuk massa kita harus mulai dari kebutuhan<sup>2</sup> mereka, tidak dari keinginan<sup>2</sup> kita, bagaimanapun djuga baiknja. Ada kalanja terdjadi bahwa massa setjara objektif membutuhkan perbaikan, tetapi setjara subjektif belum sadar untuk itu dan belum bersedia atau belum bertekad untuk melaksanakan hal itu mendjadi kenjataan; dalam hal ini kita harus sabar menunggu, dan melaksanakan perubahan itu, hanja djika, melalui pekerdjaan kita, kebanyakan daripada massa sudah mendjadi sadar akan kebutuhan itu dan bersedia serta bertekad untuk memulainja, sebab djika tidak demikian, kita sudah tentu akan mengisolasi diri kita sendiri dari massa.

„Pokoknja, pertama, apa jang sungguh<sup>2</sup> diperlukan oleh massa dan bukan apa jang kita duga diperlukan oleh mereka; dan kedua, apa jang massa bersedia dan bertekad untuk melakukannja, dan bukan apa jang kita bertekad untuk melaksanakannja atasnama mereka”.

Demikianlah, tulisan ini adalah suatu usaha jang kiranya bisa membantu untuk lebih memahami apa jang dimaksudkan dengan taktik front persatuan nasional oleh kaum Komunis, sebagai sendjata, baik untuk menjapai Pemerintah Gotongrojong, maupun Pemerintah Demokrasi Rakjat, seperti jang dirumuskan dalam Program PKI dan berbunyi sbb.:

„Hanja suatu front persatuan nasional jang dibentuk atas dasar persekutuan buruh dan tani, dipimpin oleh klas buruh, dan terbentuk sebagai hasil gerakan Rakjat jang se-luas<sup>2</sup>nja dan perdjuaan revolusioner daripada massa, akan memungkinkan Rakjat Indonesia mendirikan suatu Pemerintah Demokrasi Rakjat dan memimpin Rakjat menudju kemenangnja”.



Rp. 35,—

Sampul ditjetak di P.I.R. — 608/62 — 10.000 ex.

Isi ditjetak di Persatuan 522/62